



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan suatu kewajiban dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didasari pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026. LKjIP Tahun 2023 disampaikan sebagai laporan kinerja instansi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 kepada Bupati Kebumen.

Materi penyusunan LKjIP diperoleh dari hasil pelaksanaan kinerja OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen meliputi dari Sekretariat, Bidang Penyuluhan, Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Bidang Ketahanan Pangan, dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP ini masih ada kekurangan, namun demikian kami berharap LKjIP ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan kinerja di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Dengan tersusunnya LKjIP Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen akan mempermudah para pengambil kebijakan dalam menentukan program dan prioritas kegiatan di tahun – tahun yang akan datang. Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang setulus – tulusnya pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga bermanfaat.

Kebumen, 25 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN,



[Handwritten Signature]
KEGUYULLIONO, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780731 200501 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tupoksi	2
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	23
1.4. Landasan Hukum	27
1.5. Sistematika Penulisan	28
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	30
2.2. Rencana Kerja Tahunan	35
2.3. Perjanjian Kinerja	37
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	42
3.2. Realisasi Anggaran	68
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	85
4.2. Permasalahan/Kendala	85
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	87
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Perbandingan Jumlah Keadaan ASN Tahun 2023 dan Kebutuhan ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja	14
Tabel 1.2.	Jumlah Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan	20
Tabel 1.3.	Sarana dan Prasarana Penunjang Tahun 2023	21
Tabel 1.4.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	23
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	34
Tabel 2.2.	Rencana Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023	35
Tabel 2.3.	Rencana Kinerja Program pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023	36
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.	38
Tabel 2.5.	Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023.	38
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	42
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian Tahun 2023	43
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian Tahun 2023 dengan Tahun 2021	45
Tabel 3.4.	Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – Tahun 2023	45
Tabel 3.5.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian Tahun 2022 dengan Tahun 2026	46

	Halaman
Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian Tahun 2023	53
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	58
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun sebelumnya	60
Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Tahun 2023 dengan Tahun 2026	62
Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Tahun 2023	66
Tabel 3.11. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	69
Tabel 3.12. Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Dan Pangan	4
Gambar 1.2. Pohon Masalah Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Kebumen	25
Gambar 3.1. Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	44
Gambar.3.2. Ketersediaan Energi dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	59
Gambar 3.3. Perkembangan Ketersediaan Energi Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – Tahun 2023	60
Gambar 3.4. Perkembangan Ketersediaan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – Tahun 2023	61

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntable).

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin.

Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dalam pelaksanaannya memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kegiatan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban periodik, sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Struktur Organisasi dan Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 118 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, dinas menyelenggarakan fungsi:

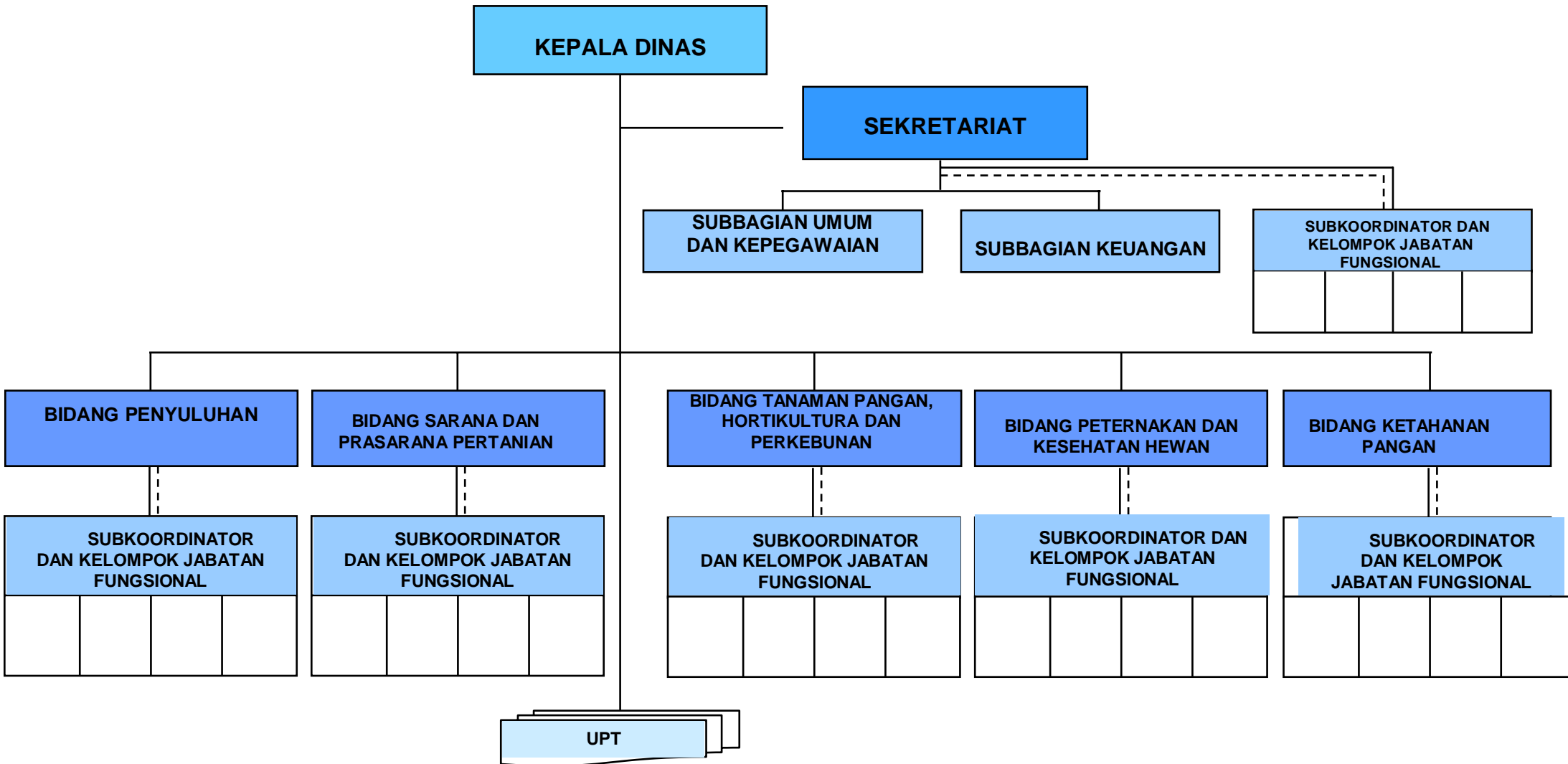
1. penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
2. perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana

pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;

5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
6. pelaksanaan administrasi Dinas;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari Kepala Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi dinas dengan membawahi Sekretariat, Bidang Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Ketahanan Pangan, dan UPT.

Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang pada gambar 1.1. berikut ini.



Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Dan Pangan

Sebagaimana gambar 1.1. masing-masing unsur dalam struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari:

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Keuangan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan sebagaimana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penyuluhan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, pembiayaan pertanian, perizinan, perlindungan petani, sarana penyuluhan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program penyuluhan;
- 2) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- 3) pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- 4) pembimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- 5) penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
- 6) pembinaan, pengawasan dan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang pertanian dan peternakan;
- 7) penyediaan dan pemanfaatan sarana penyuluhan;
- 8) penyelenggaraan promosi, percontohan, dan sekolah lapang;
- 9) pelaksanaan kegiatan asuransi usaha tani;

- 10) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan; dan
- 11) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penyuluhan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan. Subkoordinator terdiri atas:

- 1) Subkoordinator Sarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Subkoordinator Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian; dan
- 3) Subkoordinator Perizinan.

4. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagaimana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi sarana dan prasana pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian, perlindungan lahan pertanian, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
- 2) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- 3) pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan;
- 4) pengelolaan kawasan pertanian berkelanjutan;
- 5) pengelolaan irigasi pertanian;
- 6) pengelolaan sarana dan prasarana balai penyuluh pertanian, pusat kesehatan hewan dan rumah potong hewan;
- 7) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

- 8) pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana; dan
- 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian. Subkoordinator terdiri atas:

- 1) Subkoordinator Sarana Pertanian;
 - 2) Subkoordinator Pengelolaan Lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
 - 3) Subkoordinator Penyediaan Prasarana Pertanian.
5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perbenihan, perlindungan, produksi, penanganan pascapanen di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan perbenihan, perlindungan, produksi, penanganan pascapanen di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- 2) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- 3) pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;

- 4) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- 5) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- 6) pemberian bimbingan pascapanen di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- 7) pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan; dan
- 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Subkoordinator terdiri atas:

- 1) Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - 2) Subkoordinator Produksi; dan
 - 3) Subkoordinator Penanganan Pasca Panen.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kawasan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, sumber daya, pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan wilayah sumber bibit ternak/galur

ternak, pakan, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang benih/ bibit, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan dan perlindungan;
- 2) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- 3) pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan galur ternak;
- 4) pengendalian dan penanganan risiko penyakit hewan, zoonosis dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 5) pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- 6) pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- 7) pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- 8) peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
- 9) penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- 10) penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat;
- 11) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- 12) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan

Hewan. Subkoordinator terdiri atas:

- 1) Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Peternakan;
- 2) Subkoordinator Kesehatan Hewan; dan
- 3) Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner.

7. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) identifikasi, inventarisasi, pengolahan data, penyusunan, analisis dan kajian kebijakan daerah di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- 2) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- 3) pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- 4) peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan,

peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;

- 5) pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan. Subkoordinator terdiri atas:

- 1) Subkoordinator Infrastruktur Kemandirian Pangan dan Kerawanan Pangan;
- 2) Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
- 3) Subkoordinator Diversifikasi dan Keamanan Pangan.

8. Unit Pelaksana Teknis

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Berdasarkan kelas jabatan, jumlah ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 sebanyak 183 orang yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 1 (satu) orang, Jabatan Administrator 6 (enam) orang, Jabatan Pengawas 2 (dua) orang, Jabatan Fungsional Tertentu 79 orang, Jabatan Pelaksana 18 orang, dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) PPPK sejumlah 77 orang. Sementara kebutuhan ASN berdasarkan beban kerja sebanyak 294 orang, artinya bahwa ASN di DISTAPANG Kabupaten Kebumen belum memenuhi jumlah ideal sesuai dengan kebutuhan. Secara rinci hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Perbandingan Jumlah Keadaan ASN Tahun 2023 dan Kebutuhan ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja

No	Unit Organisasi	Jumlah PNS					JUMLAH PPPK		Jumlah ASN	Jumlah Kebutuhan ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja								
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi		Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)		Jumlah	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi		Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah		
			Pratama	Adminis-trator								Pengawa-s	Pratama				Adminis-trator	Pengawa-s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
2	JF Penyuluh Pertanian Ahli Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5		
3	JF Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	JF Pengawas Bibit Ternak Madya	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
5	JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya	-	-	-	9	-	9	-	-	9	-	-	-	20	-	20		
6	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	JF Pengawas Benih Tanaman Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	JF Pengawas Mutu Pakan Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	JF Perencana Ahli Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1		
14	JF Perencana Ahli Muda	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1		

No	Unit Organisasi	Jumlah PNS						JUMLAH PPPK		Jumlah ASN	Jumlah Kebutuhan ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja							
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi			Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)		Jumlah	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi		Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah	
			Pratama	Administrator	Pengawas								Pratama	Administrator				Pengawas
			Es. II	Es. III	Es. IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
15	JF Perencana Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2		
16	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
17	Pengelola Bahan Perencanaan	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
18	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		
19	JF Arsiparis Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	JF Arsiparis Mahir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	JF Arsiparis Terampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
22	Analisis Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
23	Pengelola Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
24	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
25	Pengadministrasian Umum	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
26	Pengemudi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Petugas Keamanan	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
28	Pramu Bakti	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
29	Kepala Subbagian Keuangan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1		
30	Bendahara	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
31	Verifikator Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
32	Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		

No	Unit Organisasi	Jumlah PNS						JUMLAH PPPK		Jumlah ASN	Jumlah Kebutuhan ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja							
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi			Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)		Jumlah	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi		Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah	
			Pratama	Adminis-trator	Pengawa-s								Pratama	Adminis-trator				Pengawa-s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
33	Pengadministrasi Keuangan	-	-	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-	5	5		
34	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1		
35	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
37	JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1		
38	JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
39	Analis Alat dan Mesin Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
40	Pengawas Pupuk Dan Pestisida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
41	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
42	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1		
43	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
45	JF Pengawas Benih Tanaman Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	JF Pengawas Benih Tanaman Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
47	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1		

No	Unit Organisasi	Jumlah PNS						JUMLAH PPPK		Jumlah ASN	Jumlah Kebutuhan ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja							
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi		Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jumlah		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi		Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah		
			Pratama	Administrator								Pengawas	Pratama				Administrator	Pengawas
			Es. II	Es. III								Es. IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
48	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
49	Analisis Potensi Perbenihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
50	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
51	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
52	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
53	Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
54	Pengelola Pasca Panen	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
55	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1		
56	JF Pengawas Bibit Ternak Muda	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2		
57	JF Pengawas Bibit Ternak Pertama	-	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	4	-	4		
58	JF Pengawas Bibit Ternak Penyelia	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2		
59	JF Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60	JF Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3		
61	JF Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1		
62	JF Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
63	JF Paramedik Karantina Hewan Penyelia	-	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	10	-	10		
64	JF Paramedik Karantina Hewan Mahir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Unit Organisasi	Jumlah PNS						JUMLAH PPPK		Jumlah ASN	Jumlah Kebutuhan ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja							
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi			Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)		Jumlah	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi		Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah	
			Pratama	Administrator	Pengawas								Pratama	Administrator				Pengawas
			Es. II	Es. III	Es. IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
65	JF Paramedik Karantina Hewan Terampil	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1		
66	JF Pengawas Mutu Pakan Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
67	JF Pengawas Mutu Pakan Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10		
68	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
69	Analisis Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2		
70	Pengelola Peternakan	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
71	Pengelola Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
72	Pengelola Lalu Lintas Ternak dan Izin Budi Daya Ternak	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2		
73	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil, dan Unggas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
74	Penyusun Teknis Usaha Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
75	Pengelola Data Pasca Panen	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
76	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1		
77	JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	-	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	3	-	3		
78	JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4		
79	Analisis Pangan	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
80	Pengelola Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
81	Kepala Bidang Bidang	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1		

No	Unit Organisasi	Jumlah PNS						JUMLAH PPPK		Jumlah ASN	Jumlah Kebutuhan ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja							
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi			Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)		Jumlah	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi		Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jabatan Pelaksana (JFU)	Jumlah	
			Pratama	Administrator	Pengawas								Pratama	Administrator				Pengawas
			Es. II	Es. III	Es. IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Penyuluhan																	
82	JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda	-	-	-	12	-	12	-	-	12	-	-	-	12	-	12		
83	JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	-	-	-	22	-	22	34	34	56	-	-	-	56	-	90		
84	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	-	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	4	-	4		
85	JF Penyuluh Pertanian Mahir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
86	JF Penyuluh Pertanian Terampil	-	-	-	10	-	10	8	8	18	-	-	-	28	-	28		
87	JF Penyuluh Pertanian Pemula	-	-	-	2	-	2	35	35	37	-	-	-	37	-	37		
88	Analisis Program Penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1		
89	Pengelola Bahan <i>Database</i> Kelembagaan Petani	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1		
		1	6	2	79	18	106	77	77	183	1	6	2	215	37	294		

Dilihat dari tabel diatas bahwa pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen berdasarkan Analisis Beban Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih membutuhkan tambahan tenaga ASN sejumlah 111 orang atau 62,24% dari jumlah kebutuhan 294 orang.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen didukung pula oleh tenaga harian lepas sejumlah 91 orang, dengan rincian sebagaimana Tabel 1.3. berikut ini

Tabel 1.2. Jumlah Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		S1	D3	SLTA	SMP	
1	Sekretariat	7	4	11	5	1	5	-	11
2	Bidang Penyuluhan	30	25	55	49	2	4	-	55
3	Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	2	2	4	3	1	-	-	4
4	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	2	3	5	5	-	-	-	5
5	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	4	8	8	-	-	-	8
6	Bidang Ketahanan Pangan	4	4	8	5	1	2	-	8
	Jumlah	49	42	91	75	5	11	-	91

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana Penunjang Tahun 2023

No.	Jenis Barang	Total Of ID	Kondisi			Penam bahan	Fasilitasi Pemeliharaan Tahun 2023
			Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan		
1	Bangunan Gedung	53	-	-	-	1	-
2	Kendaraan Roda 4	9	9	-	-	0	9
3	Kendaraan Roda 3	-	-	-	-	1	-
4	Sepeda Motor	79	65	1	135	-	5
5	Laptop	134	116	9	9	10	9
6	Printer	99	92	5	2	14	2
7	Scaner	1	-	-	-	-	-
8	AC	39	33	1	5	1	5
9	Lemari	85	75	10	-	-	-
10	Filing Kabinet	34	32	2	-	-	-
11	TV	1	-	-	1	2	-
12	LCD	23	18	5	-	3	-
13	Lemari Es	22	21	-	1	3	-
14	Sound/Wireless	48	45	3	-	-	-
15	Meja Kerja	118	111	-	7	-	-
16	Kursi Kerja	171	136	15	20	-	-
17	Meja Rapat	125	107	8	10	-	-
18	Kursi Rapat	747	396	151	200	-	-
19	Peralatan Studio	95	95	-	-	6	-
20	Peralatan Kedokteran	30	30	-	-	-	-
21	Peralatan Laboratorium	103	103	-	-	-	-
22	Gerobag Dorong	10	9	1	-	15	-
23	Cultivator	-	-	-	-	1	-
24	Power Theresser	-	-	-	-	1	-
25	Mesin Pemetong Rumput	-	-	-	-	28	-
26	Pompa Steam	-	-	-	-	2	-

Memperhatikan kondisi sarana dan prasaran yang ada sebagaimana tabel di atas, guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Pangan, maka perlu dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki serta masih membutuhkan beberapa kelengkapan lainnya.

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 1.1. berikut ini

Tabel 1.4.

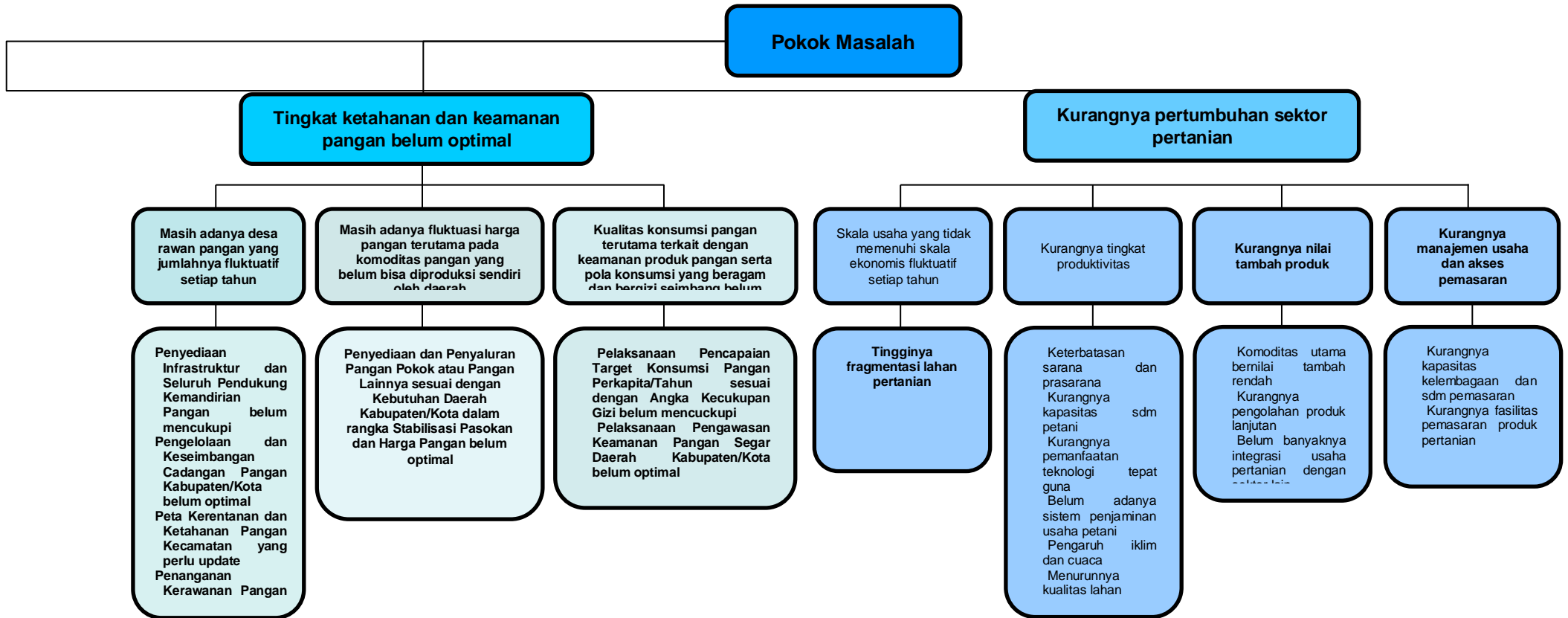
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT			
Misi: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer	Meningkatnya nilai produksi pertanian	Peningkatan nilai tambah dan kualitas sarana-prasarana pertanian	Meningkatkan dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia pertanian
			Mengembangkan kluster/ kawasan pertanian

Visi : MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT			
Misi: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan			
Berkurangnya penduduk miskin	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Penurunan kemiskinan	Meningkatkan kemampuan ekonomi dan keterampilan berusaha bagi masyarakat miskin

Strategi dan kebijakan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan pada tujuan Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer dilakukan dengan upaya meningkatkan dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia pertanian. Sedangkan pada tujuan berkurangnya penduduk miskin dilaksanakan dengan strategi penurunan kemiskinan dengan upaya meningkatkan kemampuan ekonomi dan keterampilan berusaha bagi masyarakat miskin.

Permasalahan merupakan pernyataan keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang masih dihadapi dan mungkin terjadi pada tahun 2021-2026 dapat dilihat pada pohon masalah berikut:



Gambar 1.2. Pohon Masalah Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Kebumen

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada pelayanan Distapang terdapat masalah yang berkaitan dengan tingkat ketahanan dan keamanan yang belum optimal, dan kurangnya pertumbuhan sektor pertanian. Berdasarkan review tersebut maka ditentukan isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Tingkat ketahanan dan keamanan pangan

Potensi berkurangnya ketersediaan pangan akibat penurunan produksi dikarenakan perubahan iklim global dan anomali iklim. Ketersediaan pangan yang berkaitan dengan produksi perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketika terjadi tingkat kerawanan pangan maka pemerintah melakukan cadangan pangan. Beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat, masih tergantung pada bahan pangan beras dan terigu. Selain itu terjadi penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang membahayakan kesehatan masyarakat.

2. Pertumbuhan Sektor pertanian

Kondisi pertanian masih terjadi rendahnya penyediaan benih tanaman pangan bermutu dan mengurangi peredaran benih pertanian yang belum sesuai standar kualitas. Pada kondisi di lapangan, terjadi anomali iklim sehingga menciptakan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru dan yang lebih tahan terhadap pestisida.

Penyediaan ketersediaan benih hortikultura dan perkebunan bermutu masih rendah. Selain itu masih beredarnya benih dan bibit pertanian yang belum sesuai standar kualitas. Hal tersebut berdampak pada pengelolaan pasca panen yang kondisinya belum baik, sehingga mengurangi tingkat kehilangan hasil dan mengembangkan pengolahan produk.

Masih terdapat kurangnya kapasitas/kualitas sumberdaya manusia, baik secara individu maupun kelompok serta kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan. Selain itu masih rendahnya peternakan terintegrasi yang dapat menambah pendapatan peternak, serta masih rendahnya pengembangan agribisnis peternakan

dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.

Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana, yang meliputi:

- 1) Masih kurangnya ketersediaan pupuk dan pestisida sesuai dengan jumlah, kualitas dan harga yang terjangkau oleh petani;
- 2) Masih kurangnya peningkatan sarana dan prasarana pengairan;
- 3) Masih kurangnya mekanisasi pertanian, dari mesin pra panen hingga pasca panen;
- 4) Belum adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai akibat adanya potensi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- 5) Masih kurangnya akses terhadap permodalan pertanian, baik terhadap permodalan yang disediakan pemerintah atau pihak lain;
- 6) Masih rendahnya adopsi teknologi peternakan dan teknik usaha peternakan yang lebih maju.

Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan kondisi lahan pertanian dan pangan yang fungsinya sebagai lahan pertanian ramah lingkungan, serta masih perlunya peningkatan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis.

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen di susun berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Pangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB. II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian singkat tentang Rencana Strategis dan ringkasan perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

–

LAMPIRAN

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 disusun dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 tanggal 24 September 2021.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, keterntaman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan social, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan

sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor- sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka

dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- Misi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi
- Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- Misi 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dari 5 (lima) misi tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 3 (tiga) yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal “cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia”.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
6. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;

9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang bersesuaian dengan setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, memiliki indikator dengan target capaian yang telah ditentukan, sebagai tolok ukur capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada Tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen memiliki 2 (dua) tujuan jangka menengah, yaitu:

1. meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer dengan indikator PDRB ADHK Sektor Primer, dan
2. Berkurangnya penduduk miskin dengan indikator tingkat kemiskinan.

Upaya mencapai tujuan tersebut didukung melalui 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya nilai produksi pertanian; dan
2. Meningkatnya ketahanan pangan.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Kondisi Akhir 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Sektor Primer		PDRB ADHK Sektor Primer	Milyar rupiah	5.090,09	5.362.92	5.657,88	5.969,07	6.297,37	6.643,72	6.643,72
		Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00
2	Berkurangnya Penduduk Miskin		Tingkat Kemiskinan	%	16,85	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00 - 15,00	13,50 - 14,00	13,00 - 13,50	13,00 -13,50
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Rencana Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	SATUAN	Target Tahun 2023
1	Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Sektor Primer		PDRB ADHK Sektor Primer	Milyar rupiah	5.657,88
		Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	3,00
2	Berkurangnya Penduduk Miskin		Tingkat Kemiskinan	%	15,00-16,00
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	3,00

Rencana kinerja program untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Program pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Kebumen Tahun 2023

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
X.X.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase diversifikasi dan ketahanan pangan	%	45,55
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa yang tertangani kerawanan pangannya	%	57,25
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	90
3.27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	%	12,62
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak	%	22,00
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan	%	30,00

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
	dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	%	9,42
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian (Pertanian dan Peternakan)	%	100,00
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase skor evaluasi kinerja Penyuluhan Pertanian	%	57,00

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagai penerima amanah dengan Bupati Kebumen sebagai pemberi amanah, menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel 2.4. berikut ini, dan dapat dilihat pada Lampiran1.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Kebumen.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	Milyar rupiah	5.657,88
1.1.	Meningkatnya nilai produksi pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	3,00
2.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	15,00-16,00
2.1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	3,00

Untuk mendukung tercapainya target perjanjian kinerja tahun 2023, dilaksanakan 11 program dan 32 kegiatan dengan pagu anggaran sebagaimana tabel 2.5. berikut ini.

Tabel 2.5. Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	18.777.974.000	18.777.974.000
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	34	172.695.000	172.695.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	17.459.705.000	17.459.705.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	7.200.000	7.200.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	82.230.000	82.230.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	233.780.000	188.356.000
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	23	165.778.000	211.202.000
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	178	283.246.000	267.246.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	372.740.000	389.340.000
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan	%	20,22	40.000.000	40.000.000
1.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	%	20,22	40.000.000	40.000.000
C.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase diversifikasi dan ketahanan pangan	%	45,55	777.449.000	662.381.000
1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	%	20,24	164.566.000	171.932.000
2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan yang dikelola	%	10	241.000.000	244.883.000
3.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	%	70,86	371.883.000	245.566.000
D	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangnya	%	57,25	1.087.300.000	1.094.537.000
1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten	Dokumen	1	14.400.000	14.400.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
	Kecamatan	Kebumen				
2.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	Desa	16	1.072.900.000	1.080.137.000
E.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	90	91.483.000	95.166.000
1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan	Dokumen	1	91.483.000	95.166.000
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
A.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	12,62	14.919.199.000	15.149.436.000
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian	%	65	5.488.710.000	5.727.375.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas area tanaman pertanian/perkebunan yang difasilitasi	%	0,79	9.046.689.000	9.072.212.000
3.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	%	122,55	190.130.000	178.813.000
4.	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	%	10	20.380.000	20.380.000
5.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit	%	3,79	173.290.000	150.656.000
B.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	%	22	11.925.291.000	12.264.532.053
1.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen laporan prasarana pendukung pertanian lainnya	Dokumen	2	1.178.285.000	1.586.993.053
2.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	70	5.164.602.000	5.173.769.000
3.	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kecamatan	26	5.582.404.000	5.503.770.000
C.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	2,89	1.997.348.000	2.019.714.000
1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan	Jumlah kasus Penyakit Hewan	Ekor	1.846	457.032.000	457.032.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
2.	Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Menular (PHM) Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	Ekor	3.200	159.965.000	163.648.000,00
3.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	Kali	1.810	1.267.660.000	1.267.660.000
4.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit	12	87.331.000	106.014.000
5.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pendampingan penerapan kesejahteraan hewan	Kali	6	25.360.000	25.360.000
D.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	9,42	583.766.000	591.132.000
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	8.800	583.766.000	591.132.000
E.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	%	100	50.068.000	50.068.000
1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	%	100	24.716.000	24.716.000
2.	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	%	100	25.352.000	25.352.000
F.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian	%	57	2.210.759.000	2.436.022.000
1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani	skor	2,6	2.210.759.000	2.436.022.000
	TOTAL				52.592.015.000	53.180.962.053

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen ini disusun guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kebumen sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2021-2026. Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	≥ 91%	Sangat Baik
2	76 – 90,99%	Baik
3	66 – 75,99%	Cukup
4	51 - 65,99%	Kurang

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
5	≤50,99%	Sangat Kurang

Pada tahun 2023, Dinas Pertanian dan Pangan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu;

1. Meningkatnya nilai produksi pertanian.
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan.

MENINGKATNYA NILAI PRODUKSI PERTANIAN

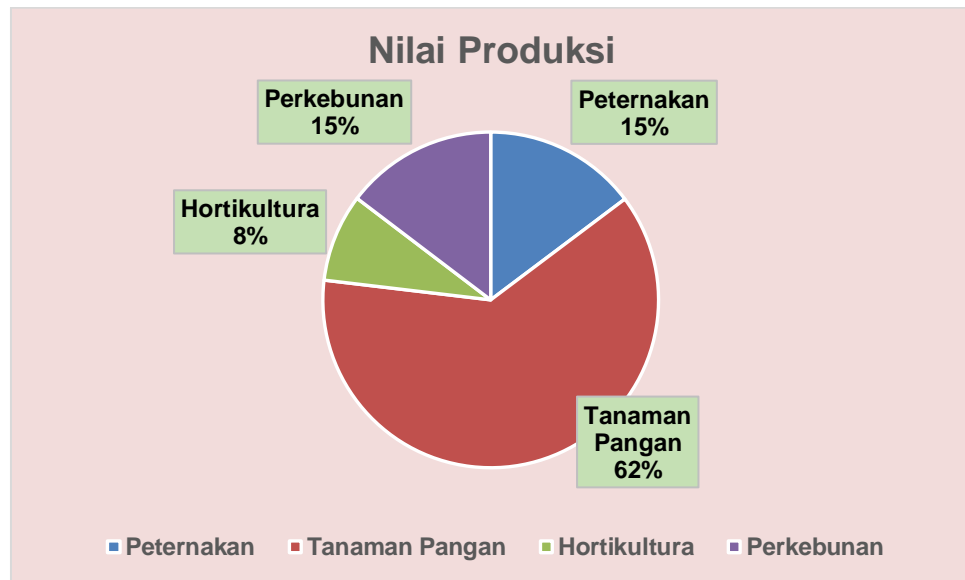
Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2023 untuk mendukung capaian tujuan yang merupakan sasaran daerah yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	3	15,98	532,81	Sangat Baik	Distapang

Indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi pertanian Kabupaten Kebumen telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja 15,98% diperoleh dengan formulasi Pengukuran : (nilai produksi pertanian tahun (n) dalam rupiah - nilai produksi pertanian tahun 2020 dalam rupiah) / nilai produksi pertanian tahun 2020 dalam rupiah x 100%. Nilai produksi pertanian Tahun 2020 sebesar Rp.4.535.602.068.918,- dan nilai produksi

Tahun 2023 sebesar Rp. 5.260.584.761.722,- yang terdiri dari nilai produksi peternakan (daging dan telur), tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura (buah - buahan, sayur – sayuran, biofarmaka), dan perkebunan, dengan kontribusi nilai produksi hasil pertanian Tahun 2023 masing – masing sector dapat dilihat pada gambar 3.1. berikut ini.



Gambar 3.1. Kontribusi Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Dilihat dari tabel di atas di ketahui kontribusi terbesar nilai produksi pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah dari komoditas tanaman pangan sebesar 62%, kemudian komoditas perkebunan dan komoditas peternakan sebesar 15%, sedangkan komoditas hortikultura sebesar 8% dari total nilai produksi pertanian sejumlah Rp.5.260.584.761.722,-

Capaian kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami penurunan, namun pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 139,22%. Perbandingan capaian kinerja 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian
Tahun 2023 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	1	12,89	1.289	2	6,68	334	3	15,98	532,81

Dilihat dari Nilai produksi pertanian Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dari komoditas peternakan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut ini.

Tabel 3.4. Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2020
– Tahun 2023

NO	Komoditas	Nilai Produksi (Rp.)			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Peternakan	955.329.468.518	794.374.208.000	675.472.222.750	775.521.422.130
2.	Tanaman Pangan	2.729.463.615.000	2.913.177.189.000	2.838.161.639.900	3.268.936.332.000
3.	Hortikultura	415.148.135.900	606.848.086.266	532.507.711.400	444.910.433.092
4.	Perkebunan	435.660.849.500	805.791.010.000	792.213.860.000	771.216.574.500
	Jumlah	4.535.602.068.918	5.120.190.493.266	4.838.355.434.050	5.260.584.761.722

Dilihat dari data diatas, nilai produksi pertanian Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,89%, kontribusi kenaikan terbesar adalah komoditas perkebunan sebesar 84,96%, komoditas hortikultura 46,18%, dan komoditas tanaman pangan 6,73 %, sedangkan untuk komoditas peternakan mengalami penurunan sebesar 16,85%. Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,50%, dengan kontribusi penurunan terbesar adalah komoditas peternakan sebesar 14,97%, hortikultura 12,25%, tanaman pangan 2,58%, dan perkebunan 1,68%. Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 mengalami peningkatan nilai produksi sebesar 8,73%, dengan kontribusi kenaikan terbesar pada komoditas tanaman pangan sebesar

15,18% dan komoditas peternakan sebesar 14,81%. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan yaitu komoditas hortikultura sebesar 16,45% dan komoditas perkebunan menurun sebesar 2,65%.

Berdasarkan target akhir Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026, realisasi kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2023 sudah melebihi sebesar 9,98% dibandingkan target akhir Tahun 2026, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut ini.

Tabel 3.5.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian
Tahun 2023 dengan Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	15,98	6	266,40

Permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam upaya pencapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

1. Penggunaan teknologi yang belum optimal;
2. Tingginya Biaya Produksi Pertanian;
3. Terbatasnya Ketersediaan dan Akses Pupuk Bersubsidi
4. Masih Tingginya Angka Kehilangan Produksi (Food Loss);
5. Masih Terjadinya Alih Fungsi Lahan ke Non Pertanian;
6. Minimnya Rata-Rata Luas Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Petani;
7. Masih Lemahnya Penegakkan Hukum Penataan Ruang;
8. Kondisi Jaringan Irigasi Belum Memadai;
9. Produktivitas ternak Sapi Unggulan (Sapi PO Kebumen) terganggu akibat Penyakit Hewan Menular Strategis;
10. Masih awamnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksin penyakit hewan menular

11. Adanya PMK dan LSD menghambat proses pengambilan sampel pada ternak SKLB
12. Kurang ketatnya pengawasan lalu lintas ternak keluar masuk daerah yang berpotensi menyebabkan penularan penyakit hewan
13. Hama Penyakit Tanaman;
14. Perubahan Iklim (Iklim Ekstrim);
15. Kemarau Panjang (Sumber Daya Air);
16. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap izin usaha;
17. Ketersediaan data usaha pertanian dan peternakan yang belum optimal;
18. Masih rendahnya kapasitas SDM penyuluh terkait Kelembagaan Ekonomi Petani dan konsolidasi petani untuk berkorporasi;
19. Minat Generasi Muda Pada Sektor Pertanian rendah;
20. Masih Rendahnya Kompetensi SDM Petani/Peternak termasuk dalam Peningkatan Nilai Tambah;
21. Tingkat Adopsi dan Inovasi Teknologi belum optimal;
22. Kelembagaan Belum Berorientasi Bisnis;
23. Berkembangnya Digitalisasi Pasar.
24. Belum optimalnya peningkatan kelas kelompok tani mengenai manajemen kelembagaan kelompok tani.
25. Faktor usia SDM petani dan kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian."
26. Masih rendahnya SDM pada kelembagaan kelompok tani
27. Masih sedikit BUMP yg berbadan hukum

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

1. Regulasi dan kebijakan yang selalu berubah;
2. Banyaknya kebocoran saluran baik saluran irigasi;
3. Tidak efektifnya pemanfaatan air irigasi;
4. Ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang;

5. Masih awamnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksin penyakit hewan menular;
6. Anomali iklim;
7. Keterbatasan fungsi penyusun data peta potensi investasi sektoral/tematik dan peluang usaha;
8. Belum optimalnya peningkatan kelas kelompok tani mengenai manajemen kelembagaan kelompok tani;
9. Faktor usia SDM petani dan kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian.

Faktor – faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

1. Semakin mahal bahan baku dan semakin sedikit ketersediaan pupuk bersubsidi;
2. Desa bersama kelompok tani melakukan pembangunan/ rehabilitasi saluran irigasi dengan anggaran desa maupun swadaya masyarakat;
3. Peran aktif dari kelompok masyarakat (GP3A, P3A) dalam memelihara saluran irigasi;
4. Regulasi pemerintah terkait lahan pertanian berkelanjutan (LP2B);
5. Sapi PO Kebumen telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI sebagai galur ternak Sapi Unggul diatas SNI Sapi PO dan sangat diminati masyarakat baik peternak kebumen maupun di luar kebumen;
6. Standarisasi Genetik Sapi PO Kebumen ,
7. Masuknya virus PMK dan LSD serta variasi agen infeksi lainnya yang menyerang wilayah perbibitan sapi PO Kebumen yang berdampak pada produktivitas ternak , Vektor Penyebar Penyakit dan Lingkungan;
8. Vektor Penyebar Penyakit dan Lingkungan
9. Peran aktif penyuluh pertanian dalam mengedukasi para petani tentang pemahaman iklim;
10. Regulasi perizinan usaha pertanian dan peternakan;
11. Kreativitas SDM penyuluh pertanian dalam pengembangan ilmu dan

teknologi pertanian;

12. Mengerakan petani milenial dalam bisnis pertanian.

Upaya – upaya pemecahan masalah dan tindaklanjutnya dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

1. Subsidi Biaya Produksi: Memberikan subsidi atau bantuan dalam bentuk pupuk, benih, dan pestisida kepada petani untuk mengurangi beban biaya produksi;
2. Mekanisasi Pertanian: Mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya produksi;
3. Pupuk Organik dan Konservasi Tanah: Mendorong penggunaan pupuk organik dan teknik konservasi tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian;
4. Diversifikasi Pupuk, dengan mengembangkan alternatif pupuk organik yang ramah lingkungan serta memberikan pelatihan tentang penggunaan pupuk organik kepada petani;
5. Peningkatan Pengawasan Distribusi, meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi untuk memastikan bahwa pupuk tersebut sampai kepada petani yang membutuhkannya;
6. Peningkatan Teknologi Pasca Panen: Meningkatkan akses petani terhadap teknologi pasca panen seperti pengeringan dan penyimpanan yang tepat guna mengurangi kerugian hasil panen;
7. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada petani tentang praktik pasca panen yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat dalam pengolahan dan penyimpanan;
8. Penguatan Perizinan: Menegakkan perizinan alih fungsi lahan dengan ketat dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar;
9. Program Konsolidasi Lahan: Menginisiasi program konsolidasi lahan untuk menggabungkan lahan pertanian kecil menjadi area yang lebih besar, meningkatkan efisiensi penggunaan lahan;
10. Sinergi Antar Pihak: Membangun koordinasi yang lebih erat antara

- pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengawasi dan menegakkan aturan penataan ruang;
11. Rehabilitasi dan Perbaikan: Melakukan rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi yang ada untuk memastikan distribusi air yang efisien dan merata;
 12. Pengelolaan Partisipatif: Melibatkan petani dalam pengelolaan irigasi, termasuk perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan;
 13. Kedisiplinan Biosecurity;
 14. Penanganan setiap penyakit hewan seperti Pengobatan massal PMK dan LSD dengan Puskeswanling;
 15. Prosedur Isolasi kasus;
 16. Pelaksanaan vaksinasi PMK dan LSD dengan target minimal 80 persen populasi sapi;
 17. surveilan/ pengamatan penyakit hewan secara rutin;
 18. Peningkatan Pelayanan Medik Reproduksi bekerjasama dengan FKH UGM;
 19. Mengusulkan anggaran untuk Pelestarian Wilayah sumber Bibit dan Bibit Sapi PO Kebumen kepada Kementan serta peningkatan produktivitas Sapi PO Kebumen;
 20. Sistem Pemantauan Dini: Membangun sistem pemantauan dini berbasis teknologi untuk mendeteksi gejala awal hama dan penyakit pada tanaman atau hewan sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih cepat;
 21. Penggunaan Metode Biopestisida: Mendorong penggunaan biopestisida yang ramah lingkungan dan mengurangi risiko dampak negatif terhadap ekosistem dibandingkan pestisida kimia;
 22. Edukasi Petani: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani mengenai praktik pertanian yang baik untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit, termasuk rotasi tanaman dan kebersihan lahan;
 23. Rencana Adaptasi Perubahan Iklim: Membuat rencana adaptasi yang komprehensif untuk menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk penyusunan strategi pengelolaan bencana yang berfokus pada skenario

ekstrim;

24. Peningkatan Keberlanjutan Pertanian: Mengembangkan varietas tanaman tahan perubahan iklim dan mempromosikan metode pertanian berkelanjutan yang dapat mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi cuaca ekstrem;
25. Infrastruktur Anti-Banjir: Membangun infrastruktur anti-banjir seperti tanggul, bendung, dan sistem drainase yang efektif untuk melindungi wilayah dari banjir akibat hujan lebat;
26. Pengembangan Sumber Air Alternatif: Mendorong penggunaan sumber air alternatif seperti desalinasi air laut, pengumpulan air hujan, dan pengelolaan air limbah yang efisien untuk mengatasi kekurangan pasokan air selama kemarau;
27. Efisiensi Penggunaan Air: Memperkenalkan teknologi irigasi cerdas dan praktik penggunaan air yang hemat guna mengurangi pemborosan air di sektor pertanian dan perkotaan;
28. Penyusunan Dokumen Usaha Pertanian dan Peternakan. Pembinaan dan sosialisasi perizinan usaha pertanian dan peternakan;
29. Program Magang dan Pelatihan: Mengembangkan program magang dan pelatihan yang menarik dan praktis, dengan mengajak generasi muda untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pertanian modern dan berkelanjutan;
30. Pendidikan Berbasis Pertanian: Mendorong inklusi pendidikan pertanian di tingkat sekolah, serta menjadikan materi pertanian menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda;
31. Pelatihan Keterampilan: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis, seperti pengelolaan usaha pertanian, pemasaran, dan manajemen, untuk meningkatkan daya saing petani dan peternak;
32. Pendampingan Teknis: Memberikan dukungan pendampingan teknis kepada petani dan peternak dalam menerapkan praktik-praktik modern yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah;
33. Pendidikan Teknologi: Menyediakan pendidikan dan pelatihan intensif mengenai teknologi pertanian terbaru kepada petani dan peternak untuk

- mendorong adopsi inovasi;
34. **Fasilitasi Akses Teknologi:** Membuat teknologi pertanian lebih mudah diakses, misalnya dengan penyediaan peralatan pertanian modern secara terjangkau atau skema pinjaman;
 35. **Pusat Inovasi Pertanian:** Mendirikan pusat inovasi pertanian di komunitas-komunitas pertanian untuk memfasilitasi kolaborasi, pengujian teknologi baru, dan berbagi pengetahuan;
 36. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:** Mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk petani dalam mengelola kelembagaan mereka dengan pendekatan bisnis yang lebih baik;
 37. **Pengenalan Konsep Agribisnis:** Mendukung petani untuk memahami konsep agribisnis, termasuk perencanaan produksi, pemasaran, dan manajemen keuangan;
 38. **Pengenalan Teknologi Digital:** Memberikan pelatihan kepada petani dalam penggunaan teknologi digital, termasuk pemasaran online, aplikasi pertanian, dan platform perdagangan digital;
 39. **Pengembangan Marketplace Digital:** Mendorong pembentukan marketplace digital khusus untuk produk pertanian, memungkinkan petani untuk berinteraksi langsung dengan konsumen dan mendapatkan harga yang lebih baik;
 40. **Kerjasama dengan Startup Teknologi:** Menggandeng startup teknologi yang fokus pada pertanian untuk mengembangkan solusi digital yang dapat membantu petani dalam pemasaran dan distribusi produk.

Upaya pencapaian target kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2023 dengan melaksanakan 6 (enam) program 17 kegiatan, untuk target kinerja program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026, target dan realisasi kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut ini, dan secara rinci sampai dengan sub kegiatan pada lampiran 2.

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Produksi Pertanian Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
A	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	12,62	36,19	286,77
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian	Persen	65,00	69,34	106,68
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas area tanaman pertanian/ perkebunan yang difasilitasi	Persen	0,58	0,63	107,88
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	Persen	123,55	123,55	100,00
4	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	Persen	10,00	22,03	220,30
5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit	Persen	3,62	3,79	104,70
B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	Persen	22,00	18,20	82,73
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya	Kegiatan	2	2	100,00
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	70	59	84,29

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
A	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	12,62	36,19	286,77
3	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kecamatan	26	26	100,00
C	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	2,89	0,25	8,65
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	Ekor	1.846	1.962	106,28
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	Kali	3.200	8.847	276,47
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	Kali	1.810	29.160	1.611,05
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	12	12	100,00
5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang memperoleh pendampingan dalam penerapan kesejahteraan hewan	Unit	6	6	100,00

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
A	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	12,62	36,19	286,77
D	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	9,42	1,13	12,00
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Hektar	8.800	555	6,31
E	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00
2	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	Persen	100	100	100,00
F	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persen	57	57	100,00
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani	Point	2,6	2,6	100,00

Meningkatnya Ketahanan Pangan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2023 untuk mendukung capaian tujuan yang merupakan sasaran daerah yaitu Berkurangnya penduduk miskin dapat dilihat pada tabel 3.7. berikut ini.

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	3	6,52	217,33	Sangat Baik	Dista pang

Indikator kinerja persentase Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja 6,52% diperoleh dengan perhitungan : (jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2023 - jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020) / jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020 x 100%. Dimana hasil perhitungan tersebut yaitu: $(3803,57-3.570,55)/3.570,55 \times 100\% = 6,52\%$. Nilai ketersediaan energi pangan dan ketersediaan protein pangan berdasarkan sumber bahan makanan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut ini.



Gambar.3.2. Ketersediaan Energi dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023

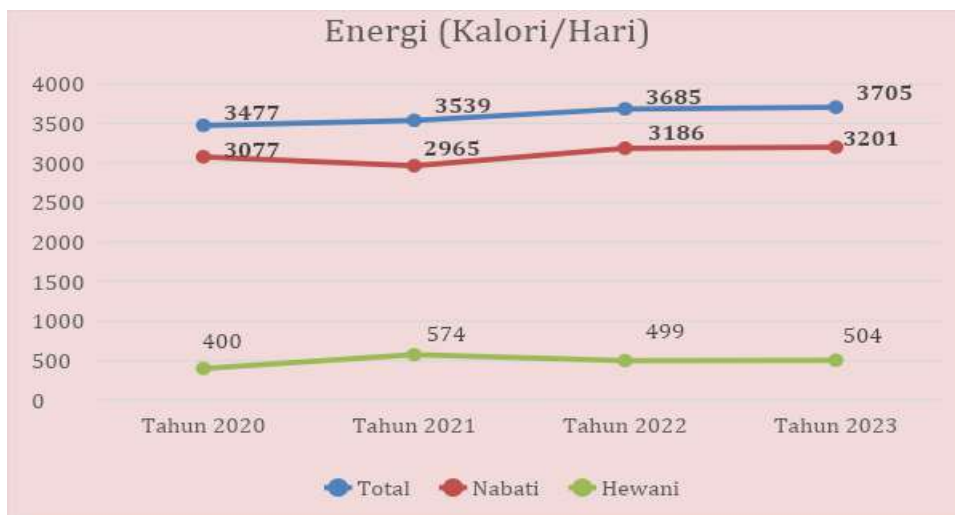
Dilihat dari gambar di atas diketahui kontribusi ketersediaan energi pangan Tahun 2023 dari kelompok bahan pangan nabati sebesar 57,6 % , dan dari kelompok bahan pangan hewani 13,60 %. Sedangkan kontribusi protein kelompok bahan pangan nabati sebesar 58,44 % lebih tinggi dibandingkan ketersediaan protein kelompok bahan pangan dari hewani sebesar 41,56 %.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan tahun 2020 adalah nol, karena nilai ketersediaan kalori dan protein pangan merupakan nilai dasar atau pembanding perhitungan capaian kinerja tahun 2021 – 2026. Dibandingkan dengan tahun 2022, capaian kinerja Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 16,01%, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8. berikut ini.

Tabel 3.8.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya
Ketahanan Pangan Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun sebelumnya.

NO	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	1	1,99	199	2	5,62	281	3	6,52	217,33

Perkembangan ketersediaan energi pangan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dari kelompok bahan pangan nabati dan hewani dapat dilihat pada gambar 3.3. berikut ini.



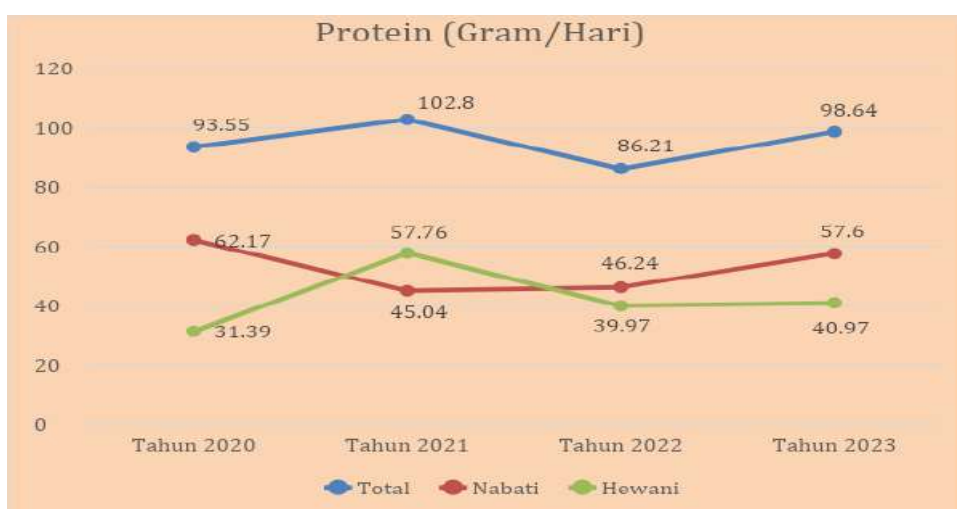
Gambar 3.3.

Perkembangan Ketersediaan Energi Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas bahwa secara total setiap tahun ketersediaan kalori meningkat, yaitu Tahun 2021 sebesar 1,78% dari Tahun 2020, dan Tahun 2022 meningkat sebesar 4,13% dari Tahun 2021, sedangkan Tahun 2023 meningkat sebesar 0,54% dari Tahun 2022. Namun demikian dilihat dari kelompok bahan pangan Nabati pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,64% dari Tahun 2020 dan Tahun 2022 meningkat sebesar 7,45% dari Tahun 2021, sedangkan

Tahun 2023 meningkat 0,47% dari Tahun 2022. Kebalikannya dengan kelompok bahan pangan hewani pada tahun 2021 meningkat sebesar 43,50% dari Tahun 2020 dan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 13,07% dari Tahun 2021, sedangkan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1% dari Tahun 2022.

Perkembangan ketersediaan protein di Kabupaten Kebumen secara total pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,89% dari Tahun 2020, dan mengalami penurunan 16,14% pada Tahun 2022 dari Tahun 2021, sedangkan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,42% dari Tahun 2022. Berdasarkan kelompok bahan makanan Nabati ketersediaan protein pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 27,55% dari Tahun 2020, dan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 sebesar 2,66% dari Tahun 2021, sedangkan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 24,57% dari tahun 2022. Sebaliknya ketersediaan protein dari bahan makanan hewani pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 84,01% dan mengalami penurunan sebesar 30,80% dari Tahun 2021, sedangkan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,50% dari Tahun 2022. Perkembangan ketersediaan protein pangan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 3.4. berikut ini.



Gambar 3.4..

Perkembangan Ketersediaan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2020 – Tahun 2023

Berdasarkan target akhir Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026, realisasi kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2023 tercapai 108,67% dibandingkan target akhir Tahun 2026, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.9. berikut ini.

Tabel 3.9.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Tahun 2023 dengan Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	6,52	6	108,67

Permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam upaya pencapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang belum optimal;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang tersedia;
3. Informasi dan *Data base pertanian Accurate, Accessible, dan Accountable*;
4. Kualitas & kompetensi SDM
5. Data yang belum sesuai dengan kebutuhan (akurat, valid)
6. Kurangnya koordinasi
7. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian pangan belum mencukupi;
8. Pengelolaan dan keterlanjutan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian pangan oleh masyarakat belum optimal
9. Masih minimnya lumbung pangan di daerah
10. Belum Mantapnya Pengelolaan Cadangan Makanan Pemerintah ;
11. Penanganan kerawanan pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang belum mencukupi;

12. Peta Kerentanan dan Ketahanan pangan Kecamatan yang perlu update;
13. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota belum optimal.
14. Pengelolaan dan keterlanjutan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian pangan oleh masyarakat belum optimal
15. Belum Mantapnya Pengelolaan Cadangan Makanan Masyarakat.
16. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Konsumsi Pangan B2SA, Masih Rendahnya Diversifikasi Pangan, Masih Tingginya Makanan Sisa/Terbuang (Food Waste), Masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan;
17. Keberlanjutan pelaksanaan pemanfaatan pekarangan akibat kebijakan peruntukan lahan dan pemanfaatan pekarangan rumah
18. Perubahan dan anomali iklim tidak menentu menyebabkan kerawanan pangan;
19. Masih adanya desa rawan pangan
20. Teknologi anomali iklim yang masih terbatas
21. Kebiasaan/ pengetahuan masyarakat terhadap pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) yang masih kurang;
22. Masih kurangnya pengetahuan sertifikasi hasil pertanian oleh masyarakat.

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi dalam upaya pencapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

1. Kualitas & kompetensi SDM;
2. Data yang belum sesuai dengan kebutuhan (akurat, valid);
3. Kurangnya koordinasi;
4. Masih minimnya lumbung pangan di daerah;
5. Regulasi yang selalu berubah;
6. Keberlanjutan pelaksanaan pemanfaatan pekarangan akibat kebijakan peruntukan lahan dan pemanfaatan pekarangan rumah;

7. Masih adanya desa rawan pangan;
8. Teknologi anomali iklim yang masih terbatas;
9. Kebiasaan/ pengetahuan masyarakat terhadap pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).

Faktor – faktor pendorong yang mempengaruhi dalam upaya pencapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Kemandirian pangan melalui Penyediaan prasarana dan sarana Lumbung pangan;
2. Kesadaran masyarakat pentingnya dalam memenuhi ketercukupan pangan dan gizi keluarga;
3. Sosialisasi dan pemanfaatan lahan pekarangan (P2L);
4. Tersedianya inovasi dan teknologi guna merepresentasikan perubahan iklim agar mencegah terjadinya krisis atau kerawanan pangan;
5. Pemberdayaan kelompok usaha di desa rawan pangan;
6. Pengurangan jumlah desa rawan pangan;
7. Pengawasan dan sertifikasi hasil pertanian.

Upaya – upaya pemecahan masalah dan tindaklanjut yang terjadi dalam upaya pencapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi secara berkala;
2. Peningkatan Kapasitas SDM;
3. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;
4. Pengelolaan informasi pertanian, penyusunan data base pertanian (Accurate, Accessible, dan Accountable);
5. Fasilitasi prasarana dan sarana lumbung pangan untuk masyarakat;
6. Pembinaan pengelolaan dan keberlanjutan infrastruktur dan kemandirian pangan;
7. Peningkatan Transparansi, yaitu pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas tentang stok cadangan pangan serta mekanisme distribusinya kepada masyarakat;

8. Edukasi Masyarakat, melalui kampanye edukasi, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya cadangan makanan pribadi dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat, Sosialisasi dan pemanfaatan lahan pekarangan (P2L);
9. Dana Talangan untuk masyarakat guna memperdayakan kelompok usaha pada desa rawan pangan;
10. Pembuatan Peta Rawan Pangan yang berkelanjutan;
11. Pengoptimalan pengawasan dan sertifikasi hasil/produk pertanian;
12. Pembinaan tentang pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).

Upaya pencapaian target kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2023 dengan melaksanakan 4 (empat) program 7 (tujuh) kegiatan, berdasarkan target kinerja program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026. Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.9. berikut ini, dan secara rinci sampai dengan sub kegiatan pada lampiran 2.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
A	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persen	20,22	20,22	100,00
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Persen	20,22	20,22	100,00
B	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Persen	45,55	47,3	103,84

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persen	20,24	20,24	100,00
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan yang dikelola	Persen	10	9,08	90,80
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	Persen	70,86	78,48	110,75
C	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	Persen	57,25	58,78	102,67
1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	Dokumen	1	1	100,00
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	Desa	9	16	177,78
D	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	90	91,63	101,81
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan	Dokumen	1	1	100,00

Data prestasi dan penghargaan atas pelaksanaan kegiatan dan pembinaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2023 sebagi berikut :

1. Sertifikat Juara dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai Juara III lomba Testimoni Program Kartu Tani tingkat Provinsi JAwa Tengah Tahun 2023.
2. Sertifikat Penghargaan dari Balai Pelatihan Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai Juara III stand terbaik kategori kabupaten/kota dalam Soropadan Agro Festival II.

3. Sertifikat Penghargaan dari Balai Pelatihan Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai Juara Harapan II Lomba Penyajian Olahan dari Umbi-Umbian Tahun 2023
4. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/0014576 sebagai Juara II Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Komoditas Sapi Potong
5. Piagam Penghargaan dari Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian sebagai Penyuluh Terbaik SIMURP Tahun 2023
6. Piagam Penghargaan dari Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian sebagai Kelompok Tani Terbaik SIMURP Tahun 2023
7. Piagam Penghargaan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagai Kelompok Tani Berprestasi.

3.2. Realisasi Anggaran

Tahun anggaran 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen melaksanakan 11 program, 31 kegiatan dan 63 subkegiatan dengan pagu anggaran perubahan sejumlah Rp. 53.180.962.053,- yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sejumlah Rp. 20.670.058.000,- dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rp. 32.510.904.053,-. Realisasi total anggaran belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2023 adalah Rp. 50.409.290.466,- atau 94,79% dari total anggaran Rp.53.180.962.053,-. Realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tertuang pada tabel 3.10. berikut ini, dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 3.11. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	20.670.058.000	20.297.988.279	98,20

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Capaian
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.777.974.000	18.420.820.022	98,10
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.695.000	162.069.015	93,85
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.459.705.000	17.128.717.845	98,10
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000	6.997.100	97,18
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.230.000	82.041.600	99,77
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.356.000	185.230.021	98,34
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.202.000	208.825.000	98,87
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.246.000	259.417.017	97,07
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.340.000	387.522.424	99,53
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	40.000.000	39.661.300	99,15

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	39.661.300	99,15
C	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	662.381.000	656.389.787	99,10
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	171.932.000	170.443.212	99,13
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	244.883.000	242.611.975	99,07
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	245.566.000	243.334.600	99,09
D	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.094.537.000	1.087.099.670	99,32
1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	14.400.000	13.996.600	97,20
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.080.137.000	1.073.103.070	99,35
E	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	95.166.000	94.017.500	98,79

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	95.166.000	94.017.500	98,79
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.510.904.053	30.111.302.187	
A	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.149.436.000	13.243.058.961	87,42
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.727.375.000	5.441.431.892	95,01
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	9.072.212.000	7.456.503.519	82,19
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	178.813.000	175.061.550	97,90
4	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	20.380.000	20.359.800	99,90
5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.656.000	149.702.200	99,37
B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.264.532.053	11.954.769.729	97,47

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.586.993.053	1.450.480.885	91,40
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.173.769.000	5.130.003.500	99,15
3	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5.503.770.000	5.374.285.344	97,65
C	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.019.714.000	1.969.164.086	97,50
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	457.032.000	446.020.686	97,59
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	163.648.000	147.050.900	89,86
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.267.660.000	1.247.325.500	98,40
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	106.014.000	103.486.300	97,62
5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	25.360.000	25.280.700	99,69

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Capaian
D	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	591.132.000	561.182.620	94,93
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	591.132.000	561.182.620	94,93
E	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	50.068.000	49.367.250	98,60
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.716.000	24.392.750	98,69
2	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	25.352.000	24.974.500	98,51
F	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.436.022.000	2.333.759.541	95,80
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.436.022.000	2.333.759.541	95,80
	TOTAL	53.180.962.053	50.409.290.466	94,79

Total anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 53.180.962.053,- terealisasi sejumlah Rp. 50.409.290.466,- atau 94,79%, sisa anggaran Rp.2.771.671.587,- atau 5,21% dari total pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa anggaran pekerjaan yang dipihak ketigakan senilai Rp.2.193.884.271,- atau 4,13% dari total pagu anggaran;
2. Penghematan/efisiensi belanja sebesar Rp.577.787.316,- atau 1,09%

dari total pagu anggaran;

Realisasi kinerja program dan kegiatan dan anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.12. berikut ini.

Tabel 3.12. Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						20.670.058.000	20.297.988.279	98,20	2.052.350.128.827	2.072.648.117.106	0,99
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00	18.777.974.000	18.420.820.022	98,10	1.859.376.579.978	1.877.797.400.000	0,99
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	34	34	100,00	172.695.000	162.069.015	93,85	17.107.430.985	17.269.500.000	0,99
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100,00	17.459.705.000	17.128.717.845	98,10	1.728.841.782.155	1.745.970.500.000	0,99
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun	Dokumen	3	3	100,00	7.200.000	6.997.100	97,18	713.002.900	720.000.000	0,99
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas	Orang	255	132	51,76	82.230.000	82.041.600	99,77	4.174.570.165	4.256.611.765	0,98
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	188.356.000	185.230.021	98,34	18.650.369.979	18.835.600.000	0,99

NO.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	80	23	28,75	211.202.000	208.825.000	98,87	5.863.232.500	6.072.057.500	0,97
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100,00	267.246.000	259.417.017	97,07	26.465.182.983	26.724.600.000	0,99
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	130	78	60,00	389.340.000	387.522.424	99,53	22.972.877.576	23.360.400.000	0,98
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persen	20,22	20,22	100,00	40.000.000	39.661.300	99,15	3.960.338.700	4.000.000.000	0,99
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Persen	20,22	20,22	100,00	40.000.000	39.661.300	99,15	3.960.338.700	4.000.000.000	0,99

NO.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
C	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Persen	45,55	47,3	103,84	662.381.000	656.389.787	99,10	68.126.532.935	68.782.922.722	0,99
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persen	20,24	20,24	100,00	171.932.000	170.443.212	99,13	17.022.756.788	17.193.200.000	0,99
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan yang dikelola	Persen	10	9,08	90,80	244.883.000	242.611.975	99,07	21.992.764.425	22.235.376.400	0,99
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	Persen	70,86	78,48	110,75	245.566.000	243.334.600	99,09	26.953.983.605	27.197.318.205	0,99
D	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangnya	Persen	57,25	58,78	102,67	1.094.537.000	1.087.099.670	99,32	111.291.738.513	112.378.838.183	0,99
1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten	Dokumen	1	1	100,00	14.400.000	13.996.600	97,20	1.426.003.400	1.440.000.000	0,99

NO.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
		Kebumen										
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	Desa	9	16	177,78	1.080.137.000	1.073.103.070	99,35	190.951.252.486	192.024.355.556	0,99
E	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	90	91,63	101,81	95.166.000	94.017.500	98,79	9.594.938.700	9.688.956.200	0,99
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan	Dokumen	1	1	100,00	95.166.000	94.017.500	98,79	9.422.582.500	9.516.600.000	0,99
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						32.510.904.053	30.111.302.187	92,62	5.602.030.499.724	5.632.141.801.911	0,99
A	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	12,62	36,19	286,77	15.149.436.000	13.243.058.961	87,42	4.331.115.806.649	4.344.358.865.610	1,00
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian	Persen	65,00	69,34	106,68	5.727.375.000	5.441.431.892	95,01	605.537.310.416	610.978.742.308	0,99
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas area tanaman pertanian/ perkebunan yang difasilitasi	Persen	0,58	0,63	107,88	9.072.212.000	7.456.503.519	82,19	971.247.470.343	978.703.973.862	0,99

NO.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	Persen	123,55	123,55	100,00	178.813.000	175.061.550	97,90	17.706.238.450	17.881.300.000	0,99
4	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	Persen	10,00	22,03	220,30	20.380.000	20.359.800	99,90	4.469.354.200	4.489.714.000	1,00
5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit	Persen	3,62	3,79	104,70	150.656.000	149.702.200	99,37	15.623.398.352	15.773.100.552	0,99
B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	Persen	22,00	18,20	82,73	12.264.532.053	11.954.769.729	97,47	1.002.656.518.292	1.014.611.288.021	0,99
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya	Kegiatan	2	2	100,00	1.586.993.053	1.450.480.885	91,40	157.248.824.415	158.699.305.300	0,99
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	70	59	84,29	5.173.769.000	5.130.003.500	99,15	430.944.812.214	436.074.815.714	0,99

NO.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
3	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kecamatan	26	26	100,00	5.503.770.000	5.374.285.344	97,65	545.002.714.656	550.377.000.000	0,99
C	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	2,89	0,25	8,65	2.019.714.000	1.969.164.086	97,50	15.502.410.308	17.471.574.394	0,89
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	Ekor	1.846	1.962	106,28	457.032.000	446.020.686	97,59	48.129.103.041	48.575.123.727	0,99
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	Kali	3.200	8.847	276,47	163.648.000	147.050.900	89,86	45.096.507.100	45.243.558.000	1,00
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	Kali	1.810	29.160	1.611,05	1.267.660.000	1.247.325.500	98,40	2.041.015.967.318	2.042.263.292.818	1,00

NO.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	12	12	100,00	106.014.000	103.486.300	97,62	10.497.913.700	10.601.400.000	0,99
5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang memperoleh pendampingan dalam penerapan kesejahteraan hewan	Unit	6	6	100,00	25.360.000	25.280.700	99,69	2.510.719.300	2.536.000.000	0,99
D	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	9,42	1,13	12,00	591.132.000	561.182.620	94,93	6.529.891.265	7.091.073.885	0,92
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Hektar	8.800	555	6,31	591.132.000	561.182.620	94,93	3.166.979.425	3.728.162.045	0,85
E	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	50.068.000	49.367.250	98,60	4.957.432.750	5.006.800.000	0,99
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	24.716.000	24.392.750	98,69	2.447.207.250	2.471.600.000	0,99

NO.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
2	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	Persen	100	100	100,00	25.352.000	24.974.500	98,51	2.510.225.500	2.535.200.000	0,99
F	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persen	57	57	100,00	2.436.022.000	2.333.759.541	95,80	241.268.440.459	243.602.200.000	0,99
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani	Point	2,6	2,6	100,00	2.436.022.000	2.333.759.541	95,80	241.268.440.459	243.602.200.000	0,99
	TOTAL						53.180.962.053	50.409.290.466	94,79	7.654.380.628.551	7.704.789.919.017	0,99

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Berdasarkan perhitungan efisiensi capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 terhadap realisasi anggaran sebesar 0,99 %. Yaitu dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((\text{PAKi} \times \text{CKi}) - \text{RAKi})}{\sum_{i=1}^n (\text{PAKi} \times \text{CKi})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((\text{Pagu Anggaran Keluaran } i \times \text{Capaian Keluaran } i) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran } i)}{(\text{Pagu Anggaran Keluaran } i \times \text{Capaian Keluaran } i)} \times 100\%$$

PAKi = Pagu Anggaran Keluaran i

CKi = Capaian Keluaran i

RAKi = Realisasi Anggaran keluaran i

BAB. IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dibuat dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2023 untuk mencapai target kinerja Tahun 2023.

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dari uraian pada bab – bab sebelumnya, secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2023, dengan indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi pertanian tercapai 532,81 % dengan kategori sangat baik.
2. Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023, dengan persentase kenaikan ketersediaan energi pangan dan protein pangan tercapai 217,33 % dengan kategori sangat baik.
3. Total anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebesar RP. 53.180.962.053 terealisasi sejumlah Rp.50.409.290.466,- atau 94,79%, sisa anggaran Rp.2.771.671.587,- atau 5,21 %. Efisiensi capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 terhadap realisasi anggaran sebesar 0,99 %.

4.2. Permasalahan/Kendala

Permasalah/ kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran kinerja Tahun 2023 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen diantaranya:

1. Refocusing pagu anggaran yang tidak diikuti perubahan target kinerja program dan kegiatan, dimana target kinerja program dan kegiatan berdasarkan renstra serta kurang cermatnya dalam penjabaran anggaran kas.
2. Perubahan kebijakan dan peraturan, sehingga mempengaruhi

pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang belum optimal, Informasi dan Data base pertanian yang masih kurang Accurate, Accessible, dan Accountable.

3. Jumlah pegawai yang semakin berkurang tentunya mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu penambahan pegawai baik di tingkat kabupaten ataupun kecamatan.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang tersedia
5. Masih minimnya lumbung pangan di daerah dan Penyediaan Infrastruktur serta Seluruh Pendukung Kemandirian pangan belum mencukupi dan belum dikelola secara optimal oleh masyarakat.
6. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Konsumsi Pangan B2SA dan kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi hasil pertanian, Diversifikasi Pangan serta tingginya makanan sisa/terbuang (*Food Waste*) oleh masyarakat.
7. Masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan sehingga keberlanjutan pelaksanaan program pemanfaatan pekarangan belum optimal.
8. Perubahan dan anomali iklim yang tidak menentu menyebabkan kerawanan pangan dengan teknologi anolami iklim yang masih terbatas sehingga masih terdapat desa rawan pangan.
9. Lokasi sumber benih (kebun induk) Kelapa Genjah Entog Kebumen (GEK) belum ada dan lokasi/poktan yang difasilitasi dalam pengembangan kelapa GEK masih terbatas.
10. Sebagian besar peternak belum menggunakan teknologi pengolahan pakan
11. Merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Penyakit Hewan Menular Strategis Lainnya yang dapat produktivitas ternak Sapi Unggulan (Sapi PO Kebumen).
12. Masih Terjadinya Alih Fungsi Lahan ke Non Pertanian sehingga ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang.
13. Kondisi Jaringan Irigasi Belum Memadai dan terjadi banyak kebocoran

saluran serta tidak efektifnya pemanfaatan air irigasi.

14. Terjadi Perubahan Iklim (*el-nino & la-nina*) dan terjadi serangan hama penyakit tanaman sehingga menurunkan produktivitas pertanian.
15. Ketersediaan data usaha pertanian dan peternakan yang belum optimal serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap izin usaha.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Berdasarkan permasalahan dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 mendukung upaya capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian dan meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2023 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dengan melaksanakan program dan kegiatan secara optimal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, difokuskan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan penyediaan sarana pertanian (Alsintan) yang layak. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan mengoptimalkan kegiatan dengan kegiatan penyediaan sarana pertanian untuk melaksanakan demplot sehingga dapat menambah luas area tanaman pertanian/ perkebunan. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya : Pelatihan teknologi pengolahan pakan dan Pelatihan teknologi pengolahan pakan perlu ditingkatkan dan ditambah jumlah pelatihannya.
2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, difokuskan dengan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung program Bupati Banyu Mili, yaitu:
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, yaitu pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES);

3. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan melaksanakan Sosialisasi terus menerus oleh dinas dan Dukungan pemerintah desa terhadap program-program pemerintah termasuk vaksinasi PMK sangat diperlukan agar kasus PHM dapat ditekan.
4. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan melaksanakan kegiatan: Pengadaan bahan pengendalian/perlindungan tanaman pangan dan gerakan pengendalian, sosialisasi Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dan usulan anggaran dari APBD Kabupaten Kebumen untuk AUTP.
5. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang utama adalah pengadaan cadangan pangan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang harus diterapkan;
6. Penanganan Kerawanan Pangan, kegiatan utama yaitu pengembangan atau peningkatan Desa Mandiri Pangan (DMP) pada lokasi yang menjadi prioritas.

Selain program dan kegiatan pendukung capaian sasaran, tentunya program dan kegiatan pendukung capaian kinerja yang lainnya juga perlu direncanakan dan dilaksanakan secara optimal untuk mencapai target yang telah ditentukan. Permasalahan yang terjadi perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang dengan cara meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan melibatkan stakeholder terkait serta perlunya dilakukan sistem pengendalian yang memadai, meningkatkan inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang ada, dan meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023, untuk dapat menjadikan masukan bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam mensukseskan program– program dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja Perubahan II Tahun 2023
Lampiran 2.	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023
Lampiran 3.	Target, Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun Anggaran 2023
Lampiran 4.	Daftar Prestasi/penghargaan yang diperoleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 Jl. Ronggowarsito Nomor 298 Kebumen Telepon (0287) 382179 Faksimile
 (0287) 282204 e-mail distapangkebumen@gmail.com
 website <https://distapang.kebumenkab.go.id/Kodepos> 54361

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TEGUH YULIONO, ST., M.Si
 Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

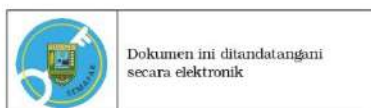
Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.
 Jabatan : Bupati Kebumen
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

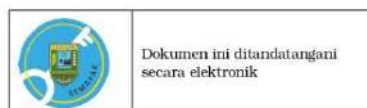
Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

Pihak Pertama,



TEGUH YULIONO, ST., M.Si
 NIP. 197807312005011006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	Milyar rupiah	5.657,88	5.657,88				5.657,88
	Sasaran: Meningkatnya nilai produksi pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	3,00	3,00				3,00
2	Berkurang penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	%	15,00-16,00	15,00-16,00				15,00-16,00
	Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Ketersediaan Protein Pangan	%	3,00	3,00				3,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.909.352.000,-	Rp 18.777.974.000,-	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 40.000.000,-	Rp 40.000.000,-	
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 777.449.000,-	Rp 662.381.000,-	
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 1.087.300.000,-	Rp 1.094.537.000,-	
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 91.483.000,-	Rp 95.166.000,-	
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 14.919.199.000,-	Rp 15.149.436.000,-	
7.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 11.925.291.000,-	Rp 12.264.532.053,-	
8.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan	Rp 1.997.348.000,-	Rp 2.019.714.000,-	

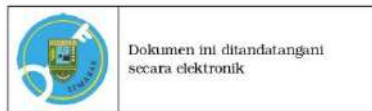


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

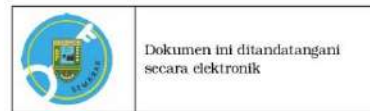
	Kesehatan Masyarakat Veteriner				
9.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	583.766.000,-	Rp	591.132.000,-
10.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	50.068.000,-	Rp	50.068.000,-
11.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	2.210.759.000,-	Rp	2.436.022.000,-

Kebumen, 27 Oktober 2023

Bupati Kebumen

Kepala Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kebumen

H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

TEGUH YULIONO, S.T.,M.Si
NIP. 197807312005011006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 2. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98,41	100	100	100,00	1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang belum optimal 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang tersedia 3. Informasi dan Data base pertanian Accurate, Accessible, dan Accountable 4. Kualitas & kompetensi SDM 5. Data yang belum sesuai dengan kebutuhan (akurat, valid) 6. Kurangnya koordinasi	1. Rapat Koordinasi secara berkala , 2. Peningkatan Kapasitas SDM, 3. penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, 4. pengelolaan informasi pertanian, 5. penyusunan data base pertanian (Accurate, Accessible, dan Accountable)	1. Ketersediaan SDM 2. Sarana & Prasarana yan cukup memadai 3. Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis	1. Rapat Koordinasi secara berkala , 2. Peningkatan Kapasitas SDM, 3. penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, 4. pengelolaan informasi pertanian, 5. penyusunan data base pertanian (Accurate, Accessible, dan Accountable)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	34	34	34	100,00				
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	9	9	9	100,00				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	9	100,00				
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	25	25	25	100,00				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25	25	25	100,00				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	12	100,00				
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	216	220	203	92,27				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	216	220	203	92,27				

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	26	12	12	100,00				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	26	12	12	100,00				
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun	Dokumen	0	3	3	100,00				
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun	Dokumen	0	3	3	100,00				
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		3	3	100,00				
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas	Orang	255	255	132	51,76				
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas	Orang	255	132	132	100,00				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	255	132	132	100,00				
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100,00				
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	100,00				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0	12	#DIV/0!				

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
					5	6	7	8	9	10	11
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Unit	0	4	4	100,00				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	4	4	100,00				
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	12	100,00				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	12	100,00				
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	100,00				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4	4	100,00				
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	12	100,00				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12	12	100,00				
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	12	100,00				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dokumen		4	4	100,00				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12	12	12	100,00				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	12	100,00				

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	12	12	100,00				
	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	4	4	100,00				
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	8	23	23	100,00				
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	15	15	100,00				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	15	15	100,00				
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	8	8	8	100,00				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	8	100,00				
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	100,00				
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	100,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	100,00				
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	100,00				
	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	100,00				
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	100,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	100,00				
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	130	130	78	60,00				
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	55	55	55	100,00				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55	55	55	100,00				
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	60	16	16	100,00				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	16	16	100,00				
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	15	9	9	100,00				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	9	9	100,00				

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
1					5	6	7	8	9	10	11
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persen	20,22	20,22	20,22	100,00	1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian pangan belum mencukupi 2. Pengelolaan dan keterlanjutan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian pangan oleh masyarakat belum optimal 3. Masih minimnya lumbung pangan di daerah		Peningkatan Infrastruktur Kemandirian pangan melalui Penyediaan prasarana dan sarana Lumbung pangan	Fasilitasi prasarana dan sarana lumbung pangan untuk masyarakat. Pembinaan pengelolaan dan keberlanjutan infrastruktur dan kemandirian pangan
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Persen	20,22	20,22	20,22	100,00				
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah kelompok Lumbung Pangan yang Dibina (Jumlah Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan)	Kelompok/ Unit	9	8	8	100,00				
		Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	9	0	0	#DIV/0!				
C	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Persen	43,17	45,55	47,3	103,84	1. Belum Mantapnya Pengelolaan Cadangan Makanan Masyarakat. 2. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Konsumsi Pangan B2SA, 3. Masih Rendahnya Diversifikasi Pangan. 4. Masih Tingginya Makanan Sisa/Terbuang (Food Waste). 5. Masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan 6. Regulasi yang selalu berubah, 7. Keberlanjutan pelaksanaan pemanfaatan pekarangan akibat kebijakan peruntukan lahan dan pemanfaatan pekarangan rumah		1. Kesadaran masyarakat pentingnya dalam memenuhi kecukupan pangan dan gizi keluarga. 2. Sosialisasi dan pemanfaatan lahan pekarangan (P2L)	1. Peningkatan Transparansi: Pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas tentang stok cadangan pangan serta mekanisme distribusinya kepada masyarakat. 2. Edukasi Masyarakat: Melalui kampanye edukasi, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya cadangan makanan pribadi dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat, Sosialisasi dan pemanfaatan lahan pekarangan (P2L)"

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persen	18,74	20,24	20,24	100,00				
a	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	4	4	4	100,00				
	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	4	4	4	100,00				
b	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kelompok	27	10	27	270,00				
	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	27	10	27	270,00				
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persen	8,3	10	9,08	90,80				
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton (GKG)	20	20	20	100,00				
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	20	20	20	100,00				

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
1					5	6	7	8	9	10	11
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	Persen	73,47	70,86	78,48	110,75				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekecaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit/ benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	Desa	12	4	4	100,00				
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekecaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	12	4	4	100,00				
D	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	Persen	54,96	57,25	58,78	102,67	1. Penanganan kerawanan pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang belum mencukupi 2. Peta Kerentanan dan Ketahanan pangan Kecamatan yang perlu update 3. Perubahan dan anomali iklim tidak menentu menyebabkan kerawanan pangan 4. Masih adanya desa rawan pangan 5. teknologi anomali iklim yang masih terbatas		1. Tersedianya inovasi dan teknologi guna merepresentasikan perubahan iklim agar mencegah terjadinya krisis atau kerawanan pangan 2. Pemberdayaan kelompok usaha di desa rawan pangan 3. Pengurangan jumlah desa rawan pangan	1. Dana Talangan untuk masyarakat guna memperdayakan kelompok usaha pada desa rawan pangan. 2. Pembuatan Peta Rawan Pangan yang berkelanjutan
1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	Dokumen	1	1	1	100,00	"			
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	Dokumen	1	1	1	100,00				

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	1	100,00				
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa	11	9	16	177,78				
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa	11	16	16	100,00				
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	11	16	16	100,00				
E	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persen	88,28	90	91,63	101,81	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota belum optimal 2. Kebiasaan/ pengetahuan masyarakat terhadap pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) yang masih kurang. 3. Masih kurangnya pengetahuan sertifikasi hasil pertanian oleh masyarakat		1. Pengawasan dan sertifikasi hasil pertanian	1. Pengoptimalan pengawasan dan sertifikasi hasil/produk pertanian. 2. Pembinaan tentang pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	100,00				
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Buah	256	170	215	126,47				

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	256	1	1	100,00				
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	4	13	325,00				

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	15,75	12,62	36,19	286,77	<p>1. penggunaan teknologi yang belum optimal</p> <p>2. Tingginya Biaya Produksi Pertanian</p> <p>3. Terbatasnya Ketersediaan dan Akses Pupuk Bersubsidi:</p> <p>4. Masih Tingginya Angka Kehilangan Produksi (Food Loss)</p> <p>5. Regulasi dan kebijakan yang selalu berubah</p>		Semakin mahal bahan baku dan semakin sedikit ketersediaan pupuk bersubsidi	<p>1. Subsidi Biaya Produksi: Memberikan subsidi atau bantuan dalam bentuk pupuk, benih, dan pestisida kepada petani untuk mengurangi beban biaya produksi.</p> <p>2. Mekanisasi Pertanian: Mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya produksi.</p> <p>3. Pupuk Organik dan Konservasi Tanah: Mendorong penggunaan pupuk organik dan teknik konservasi tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian.</p> <p>4. Diversifikasi Pupuk: Mengembangkan alternatif pupuk organik yang ramah lingkungan serta memberikan pelatihan tentang penggunaan pupuk organik kepada petani.</p> <p>5. Peningkatan Pengawasan Distribusi: Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi untuk memastikan bahwa pupuk tersebut sampai kepada petani yang membutuhkannya.</p> <p>6. Peningkatan Teknologi Pasca Panen: Meningkatkan akses petani terhadap teknologi pasca panen seperti pengeringan dan penyimpanan yang tepat guna mengurangi kerugian hasil panen.</p> <p>7. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada petani tentang praktik pasca panen yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat dalam pengolahan dan penyimpanan.</p>

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persen	64,18	65,00	69,34	106,68				
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Unit	196	509	639	125,54				
		Laporan	1	1	1	100,00				
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dokumen	2	2	2	100,00				
		Laporan	2	2	2	100,00				
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	0,15	0,58	0,63	107,88				
a	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Lokasi	9	9	9	100,00	a. belum adanya lokasi sumber benih (kebun induk) kelapa GEK b. Terbatasnya lokasi / poktan yang difasilitasi dalam pengembangan kelapa GEK	a. Pembuatan kebun induk kelapa GEK yang dimiliki penda b. Menambah lokasi/ poktan yang difasilitasi dalam pengembangan kelapa GEK	Adanya potensipengembangan kelapa GEK di wilayah Kabupaten Kebumen	
		VUB		1	1	100,00				
	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian									

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
b	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luas Areal Tanam Pertanian Yang Mendapatkan Fasilitas	Ha	178	775	775	100,00	1. Beragamnya komoditas dan banyaknya kelompok yang harus difasilitasi 2. Banyaknya pengadaan barang berupa benih/bibit dan saprodi yang harus dilaksanakan 3. Masa manfaat barang berupa benih/bibit yang sangat tergantung musim tanam	1. Mengidentifikasi dan mengelompokkan komoditas tanaman berdasarkan jenisnya serta mengelompokkan kelompok berdasarkan kecamatan 2. Penyusunan RUP dengan menggabungkan beberapa komoditas tanaman berdasarkan jenisnya yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 3. Identifikasi dan rekapitulasi ketersediaan barang berupa benih/bibit tanaman sesuai masa tanamnya	1. Mengalokasikan kegiatan dengan jumlah kelompok yang tidak banyak namun dengan luasan dan fasilitas yang lebih lengkap 2. Ketepatan waktu dalam pengadaan barang berupa benih/bibit tanaman dan saprodi 3. Kepastian pemanfaatan barang berupa benih/bibit tanaman dan saprodi oleh kelompok sesuai masa tanamnya	1. Verifikasi dan validasi usulan dari musrenbang maupun POKIR dengan lebih cermat dan ketat 2. Optimalisasi penggunaan e katalog 3. Memfokuskan kegiatan komoditas tanaman pokok dan unggulan
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen		3	3	100,00	Banyaknya jenis komoditas tanaman yang diusulkan dan harus dialokasikan	Pengelompokkan komoditas tanaman berdasarkan jenisnya menjadi 3 jenis yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Semakin lengkap dan validnya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan 3 komoditas yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Komoditas tanaman yang beragam tetap dibuatkan dokumen secara rinci per jenis tanaman dan selanjutnya digabung dokumennya menjadi kelompok yang lebih besar yaitu 3 dokumen berupa tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
c	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kelompok yang mendapatkan fasilitas pasca panen	Kelompok	21	32	32	100,00	waktu pembinaan yang terkadang tidak sesuai dengan musim panen komoditas pangan, horti dan perkebunan	dengan menyesuaikan pembinaan dengan waktu musim panen MT 1 dan MT 2.	faktor pendorong: kesesuaian manfaat pembinaan agar tepat saat musim panen MT 1 dan MT 2	
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	21	32	32	100,00				
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	Persen	139,7	123,55	123,55	100,00				
a	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas Gizi pakan ternak	Kelompok	6	20	20	100,00	Sebagian besar peternak belum menggunakan teknologi pengolahan pakan	Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pakan	Masih kurangnya pengetahuan peternak tentang teknologi pengolahan pakan	Pelatihan teknologi pengolahan pakan perlu ditingkatkan dan ditambah jumlah pelatihannya.

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	6	1	1	100,00				
4	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persen	14,5	10,00	22,03	220,30				
a	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Unit	1	10	22,03	220,30	Obat hewan yang beredar belum memenuhi standar mutu, khasiat dan keamanan bagi hewannya sendiri maupun aman terhadap lingkungan dan manusia yang mengkonsumsi produk ternak; Belum memiliki izin usaha obat hewan.	Pendataan, pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha obat hewan.	Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha obat hewan terhadap obat hewan yang memenuhi standar mutu, khasiat dan keamanan bagi hewannya sendiri maupun aman terhadap lingkungan dan manusia yang mengkonsumsi produk ternak serta proses perizinan usaha obat hewan.	Melaksanakan pembinaan secara intensif, memperketat pengawasan kepada pelaku usaha obat hewan yang telah terdata dan membantu memberikan informasi sampai pedampingan proses perizinan usaha obat hewan.
	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan		1	1	100,00				
5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	3,81	3,62	3,79	104,70				
a	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Buah	2000	2000		-	- Masih Banyaknya ternak yang belum teridentifikasi - Pendataan ternak yang masih minim	- pendataan, pembinaan dan pemasangan anting ternak sebagai identitas ternak	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari peternak terhadap pentingnya identifikasi ternak	Melaksanakan pembinaan dan pendataan secara intensif, serta melaksanakan pemasangan anting ternak sebagai identitas ternak dalam bentuk kartu ternak
	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang beredar	Ekor	2000	2000		-				

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Temak	Jumlah Bibit Temak Sapi PO Kebumen yang mendapatkan surat keterangan layak bibit (SKLB) dan LS Pro	Ekor	503	500		-	- Masih banyak sapi layak bibit yang belum mendapatkan sertifikasi - Minimnya data silsilah sapi - Ketersediaan sumber bibit sapi PO dan keberlanjutan wilayah sumber bibit sapi PO terancam'	- Pembinaan secara masif kepada masyarakat peternak khususnya yang ada di desa kelompok perbibitan - Melakukan pendataan dan pencatatan silsilah sapi dan data kuantitatif sapi - Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit untuk sapi yang memenuhi kriteria	- Masyarakat peternak masih minim pemahaman mengenai kebermanfaatannya dari Surat keterangan layak bibit - Data Kuantitatif dan Silsilah sapi yang belum sepenuhnya di pahami kebermanfaatannya oleh peternak	- Menginformasikan secara masif kepada masyarakat peternak di kabupaten kebumen mengenai adanya penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit - Menjadikan Surat Keterangan Layak Bibit sebagai Syarat dalam kegiatan (misal : kontes temak, pengadaan temak bantuan dll)
		Jumlah Benih/Bibit Temak yang Beredar dan Bersertifikat	Ekor		500		-				
B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	Persen	17,52	22,00	18,20	82,73	1. Masih Terjadinya Alih Fungsi Lahan ke Non Pertanian: 2. Minimnya Rata-Rata Luas Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Petani: 3. Masih Lemahnya Penegakkan Hukum Penataan Ruang: 4. Kondisi Jaringan Irigasi Belum Memadai 5. Banyaknya kebocoran saluran baik saluran irigasi 6. Tidak efektifnya pemanfaatan air irigasi. 7. Ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang"	1. Desa bersama kelompok tani melakukan pembangunan/ rehabilitasi saluran irigasi dengan anggaran desa maupun swadaya masyarakat. 2. Peran aktif dari kelompok masyarakat (GP3A, P3A) dalam memelihara saluran irigasi. 3. Regulasi pemerintah terkait lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) (Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan SK Bupati tentang LP2B)	1. masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang alih fungsi lahan 2. Ketergantungan terhadap pemerintah terkait pemeliharaan jaringan irigasi	1. Penguatan Perizinan: Menegakkan perizinan alih fungsi lahan dengan ketat dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar. 2. Program Konsolidasi Lahan: Menginisiasi program konsolidasi lahan untuk menggabungkan lahan pertanian kecil menjadi area yang lebih besar, meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. 3. Sinergi Antar Pihak: Membangun koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengawasi dan menegakkan aturan penataan ruang. 4. Rehabilitasi dan Perbaikan: Melakukan rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi yang ada untuk memastikan distribusi air yang efisien dan merata. 5. Pengelolaan Partisipatif: Melibatkan petani dalam pengelolaan irigasi, termasuk perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan.
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya	Kegiatan	2	2	2	100,00				

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Dokumen	2	2	2	100,00				
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	2	2	100,00				
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	46	70	59	84,29				
a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	17	6	6	100,00				
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	17	6	6	100,00				
b	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Unit	21	18	18	100,00				
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	21	18	18	100,00				
c	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang mendapatkan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	2	1	1	100,00				
		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	1	1	100,00				
d	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh/Puskesmas di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	2	3	3	100,00				

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	3	3	100,00				
e	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Unit	5	4	6	150,00				
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	5	4	6	150,00				
3	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan	26	26	26	100,00	- informasi mengenai wilayah sumber bibit ternak belum diketahui di semua kecamatan - Belum semua kecamatan yang ada di kabupaten kebumen memiliki kelompok perbibitan - Petugas pengawas bibit ternak belum ada di setiap kecamatan	- Pembinaan secara masif di semua kecamatan mengenai pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak - Pengadaan petugas pengawas bibit ternak di setiap kecamatan - Pendampingan peternak di setiap kecamatan	- Kebumen telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit sapi PO - Sapi PO kebumen telah mendapatkan surat keputusan menteri pertanian RI sebagai galur ternak sapi unggul dan berSNI	1. Melaksanakan pembinaan secara masif mengenai pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit 2. Menginformasikan kepada seluruh masyarakat peternak mengenai keunggulan Sapi PO Kebumen, standar genetik sapi PO kebumen. 3. Melakukan pendampingan peternak di setiap kecamatan
a	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kecamatan	26	26	26	100,00	- informasi mengenai wilayah sumber bibit ternak belum diketahui di semua kecamatan - Belum semua kecamatan yang ada di kabupaten kebumen memiliki kelompok perbibitan - Petugas pengawas bibit ternak belum ada di setiap kecamatan	- Pembinaan secara masif di semua kecamatan mengenai pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak - Pengadaan petugas pengawas bibit ternak di setiap kecamatan - Pendampingan peternak di setiap kecamatan	- Kebumen telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit sapi PO - Sapi PO kebumen telah mendapatkan surat keputusan menteri pertanian RI sebagai galur ternak sapi unggul dan berSNI	1. Melaksanakan pembinaan secara masif mengenai pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit 2. Menginformasikan kepada seluruh masyarakat peternak mengenai keunggulan Sapi PO Kebumen, standar genetik sapi PO kebumen. 3. Melakukan pendampingan peternak di setiap kecamatan

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Temak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	1	1	100,00	- kurang adanya petugas recording yang berada di wilayah sumber bibit - masyarakat peternak di wilayah sumber bibit kurang memahami pentingnya recording - data recording sangat minim dan tidak berkelanjutan	- pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat peternak terkait dengan pentingnya recording - pelaporan oleh recorder secara berkala mengenai penambahan dan pengurangan jumlah sapi disertai dengan data kualitatif dan kuantitatif	- Kebumen telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit sapi PO - Sapi PO kebumen telah mendapatkan surat keputusan menteri pertanian RI sebagai galur temak sapi unggul dan berSNI	- melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat peternak terkait dengan pentingnya recording - pelaporan oleh recorder secara berkala mengenai penambahan dan pengurangan jumlah sapi disertai dengan data kualitatif dan kuantitatif
C	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persen	-2,93	2,89	0,25	8,65	1. Produktivitas ternak Sapi Unggulan (Sapi PO Kebumen) terganggu akibat Penyakit Hewan Menular Strategis 2. Masih awamnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksin penyakit hewan menular 3. Kasus penyakit PHM (penyakit Hewan Menular) naik akibat penyebaran yang tidak terkendali	1. Mengintensifkan pengendalian dan pemberantasan PHM (Penyakit Hewan Menular)	1. Sapi PO Kebumen telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI sebagai galur temak Sapi Unggul diatas SNI Sapi PO dan sangat diminati masyarakat baik peternak kebumen maupun di luar kebumen 2. Standarisasi Genetik Sapi PO Kebumen 3. Masuknya virus PMK dan LSD serta variasi agen infeksi lainnya yang menyerang wilayah perbibitan sapi PO Kebumen yang berdampak pada produktivitas ternak 4. Vektor Penyebar Penyakit dan Lingkungan	1. Kedisiplinan Biosecurity 2. Penanganan setiap penyakit hewan seperti Pengobatan massal PMK dan LSD dengan Puskesmas 3. Prosedur Isolasi kasus 4. Pelaksanaan vaksinasi PMK dan LSD dengan target minimal 80 persen populasi sapi 5. surveilan/ pengamatan penyakit hewan secara rutin 6. Peningkatan Pelayanan Medik Reproduksi bekerjasama dengan FKH UGM 7. Mengusulkan anggaran untuk Pelestarian Wilayah sumber Bibit dan Bibit Sapi PO Kebumen kepada Kementan serta peningkatan produktivitas Sapi PO Kebumen
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ekor	1.967	1.846	1.962	106,28				

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI	
				TARGET	REALISASI	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
a	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang terlayani kesehatannya	Ekor	6.855	15500		-	Masih awamnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksin penyakit hewan menular sehingga menghambat proses vaksinasi sebagai upaya pencegahan PMK dan LSD	Melaksanakan vaksinasi PMK dan LSD dengan target minimal 80 persen populasi sapi	1. Masuknya virus PMK dan LSD serta variasi agen infeksi lainnya yang menyerang wilayah perbibitan sapi PO Kebumen yang berdampak pada produktivitas ternak 2. Vektor Penyebar Penyakit dan Lingkungan	1. Kedisiplinan Biosecurity 2. Penanganan setiap penyakit hewan seperti Pengobatan massal PMK dan LSD dengan Puskesmas 3. Prosedur Isolasi kasus 4. Pelaksanaan vaksinasi PMK dan LSD dengan target minimal 80 persen populasi sapi 5. Surveilans/ pengamatan penyakit hewan secara rutin 6. Peningkatan Pelayanan Medik Reproduksi bekerjasama dengan FKH UGM
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	1	1	100,00				
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	Kali	2.526	3.200	8.847	276,47				
a	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah sampel yang mendapatkan diagnostik veteriner	Buah	980	800	931	116,38	Adanya PMK dan LSD menghambat proses pengambilan sampel pada ternak SKLB	Melaksanakan uji laboratorium diagnostik veteriner berupa pemeriksaan sampel serum darah untuk penyakit di wilayah sumber bibit terutama Paratuberculosis dan Ros Bengal Test	Masuknya virus PMK dan LSD serta variasi agen infeksi lainnya yang menyerang wilayah perbibitan sapi PO Kebumen yang berdampak pada produktivitas ternak	Melaksanakan surveilans/pengamatan penyakit hewan secara rutin sebagai upaya untuk menjaga kelestarian wilayah sumber bibit Sapi PO Kebumen
		Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	1	1	100,00				
b	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan yang diawasi	Ekor	1.546	3200	7916	247,38	Kurang ketatnya pengawasan lalu lintas ternak keluar masuk daerah yang berpotensi menyebabkan penularan penyakit hewan	Melaksanakan pembinaan kepada para pedagang ternak dan memperketat pengawasan keluar masuknya ternak sesuai persyaratan administrasi yang berlaku	Kurangnya pengetahuan para pedagang ternak akan prosedur pengeluaran dan pemasukan ternak yang benar sebagai upaya meminimalisir penyebaran penyakit	Memperketat lalu lintas ternak keluar masuk daerah sesuai Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Negara Republik Indonesia

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	1	100,00				
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kali	1.270	1.810	29.160	1611,05				
a	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kali	1270	1810	11040	609,94	Kurangnya tenaga medik dan paramedik sehingga setiap personilnya harus mencakup wilayah yang sangat luas dengan menyesuaikan kegiatan lain diluar pelayanan medik	Penambahan personil paramedik swasta	Berkurangnya personil puskesmas	Penambahan dan pemerataan personil tenaga medis untuk dilapangan
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	1	1	1	100,00				
	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	4	12	12	100,00				
a	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Unit	4	12	12	100,00	- Masih banyaknya pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikat halal dan NKV	-Sosialisasi proses pengajuan sertifikat halal dan NKV	Adanya peraturan bahwa pelaku usaha yang produknya diedarkan ke masyarakat harus bersertifikat halal	Jumlah pelaku usaha yang disosialisasi ditambah
	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	1	100,00				
b	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Buah	100	100	100	100,00	Penjaminan keamanan Produk pangan asal hewan yang beredar di masyarakat	Diadakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	Jaminan produk pangan asal hewan yang beredar di masyarakat yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).	Parameter pengujian laboratorium ditambah sehingga hasil laboratorium lebih lengkap
	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	1	-	-				

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang memperoleh pendampingan dalam penerapan kesejahteraan hewan	Unit	6	6	6	100,00	- Pelaku usaha peternakan kurang memperhatikan kesejahteraan Hewan	Sosialisasi kepada jagal, panitia kurban dan takmir masjid tentang penerapan kesejahteraan hewan	Kesejahteraan hewan yang mau dipotong tidak stress, tidak takut dan tidak sakit.	Sosialisasi tentang penerapan kesejahteraan hewan ditingkatkan dan ditambah jumlahnya
a	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah pendampingan penerapan kesejahteraan hewan	Kali	6	6	6	100,00				
		Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	1	1	1	100,00				

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
D	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	2,3	9,42	1,13	12,00	1. Hama Penyakit Tanaman 2. Perubahan Iklim (Iklim Ekstrem): 3. Kemarau Panjang (Sumber Daya Air): 4. Anomali iklim .	sosialisasi dan pembinaan kepada petani pentingnya pengendalian OPT secara preventif dan upayaantisipasi dampak perubahan iklim (kebanjiran/kekeringan)	Peran aktif penyuluh pertanian dalam mengedukasi para petani tentang pemahaman iklim	1. Sistem Pemantauan Dini: Membangun sistem pemantauan dini berbasis teknologi untuk mendeteksi gejala awal hama dan penyakit pada tanaman atau hewan sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih cepat. 2. Penggunaan Metode Biopestisida: Mendorong penggunaan biopestisida yang ramah lingkungan dan mengurangi risiko dampak negatif terhadap ekosistem dibandingkan pestisida kimia. 3. Edukasi Petani: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani mengenai praktik pertanian yang baik untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit, termasuk rotasi tanaman dan kebersihan lahan. 3. Rencana Adaptasi Perubahan Iklim: Membuat rencana adaptasi yang komprehensif untuk menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk penyusunan strategi pengelolaan bencana yang berfokus pada skenario ekstrem. 4. Peningkatan Keberlanjutan Pertanian: Mengembangkan varietas tanaman tahan perubahan iklim dan mempromosikan metode pertanian berkelanjutan yang dapat mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi cuaca ekstrem. 5. Infrastruktur Anti-Banjir: Membangun infrastruktur anti-banjir seperti tanggul, bendung, dan sistem drainase yang efektif untuk melindungi wilayah dari banjir akibat hujan lebat. 6. Pengembangan Sumber Air Alternatif: Mendorong penggunaan sumber air alternatif seperti desalinasi air laut, pengumpulan air hujan, dan pengelolaan air limbah yang efisien untuk mengatasi kekurangan pasokan air selama kemarau. 7. Efisiensi Penggunaan Air: Memperkenalkan teknologi irigasi cerdas dan praktik penggunaan air yang hemat guna mengurangi pemborosan air di sektor pertanian dan perkotaan.

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Hektar	2.150	8.800	555	6,31				
a	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	350	555	555	100,00				
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha		555	555	100,00				
b	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ha	1501	3237	613	18,94	Tidak terlaksananya pelaksanaan AUPP seluas 3237 ha dikarenakan adanya refocusing anggaran, sehingga anggaran hanya untuk memfasilitasi kegiatan seluas 613 ha			
	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	2	2	2	100,00				
E	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persen	100	100,00	100,00	100,00	1. Ketersediaan data usaha pertanian dan peternakan yang belum optimal 2. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap izin usaha 3. Keterbatasan fungsi penyusun data peta potensi investasi sektoral/tematik dan peluang usaha.	1. Penyusunan dokumen usaha pertanian dan peternakan. 2. Sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis perizinan usaha pertanian dan peternakan.	Regulasi perizinan usaha pertanian dan peternakan	1. Penyusunan Dokumen Usaha Pertanian dan Peternakan. 2. Sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis perizinan usaha pertanian dan peternakan
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100,00	100,00	100,00				

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
a	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	Persen	100	100	100	100,00	Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap izin usaha pertanian	Kesadaran masyarakat terhadap izin usaha pertanian perlu ditingkatkan	Regulasi perizinan usaha pertanian	Perlunya sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan monev izin usaha pertanian
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	1	1	100,00				
2	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	Persen	100	100	100	100,00	Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap izin usaha peternakan	Kesadaran masyarakat terhadap izin usaha peternakan perlu ditingkatkan	Regulasi perizinan usaha peternakan	Perlunya sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan monev izin usaha peternakan
a	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan		100	100	100	100,00				
		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	1	1	1	100,00				

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persen	56	57	57	100,00	<p>1. Masih rendahnya kapasitas SDM penyuluh terkait Kelembagaan Ekonomi Petani dan konsolidasi petani untuk berkorporasi;</p> <p>2. Minat Generasi Muda Pada Sektor Pertanian rendah</p> <p>3. Masih Rendahnya Kompetensi SDM Petani/Peternak termasuk dalam Peningkatan Nilai Tambah;</p> <p>4. Tingkat Adopsi dan Inovasi Teknologi belum optimal</p> <p>5. Kelembagaan Belum Berorientasi Bisnis;</p> <p>6. Berkembangnya Digitalisasi Pasar.</p> <p>7. Belum optimalnya peningkatan kelas kelompok tani mengenai manajemen kelembagaan kelompok tani.</p> <p>8. Faktor usia SDM petani dan kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian."</p>		<p>1. Kreativitas SDM penyuluh pertanian dalam pengembangan ilmu dan teknologi pertanian.</p> <p>2. Mengerakan petani milenial dalam bisnis pertanian.</p>	<p>1. Program Magang dan Pelatihan: Mengembangkan program magang dan pelatihan yang menarik dan praktis, dengan mengajak generasi muda untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pertanian modern dan berkelanjutan.</p> <p>2. Pendidikan Berbasis Pertanian: Mendorong inklusi pendidikan pertanian di tingkat sekolah, serta menjadikan materi pertanian menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda.</p> <p>3. Pelatihan Keterampilan: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis, seperti pengelolaan usaha pertanian, pemasaran, dan manajemen, untuk meningkatkan daya saing petani dan peternak.</p> <p>4. Pendampingan Teknis: Memberikan dukungan pendampingan teknis kepada petani dan peternak dalam menerapkan praktik-praktik modern yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah.</p> <p>5. Pendidikan Teknologi: Menyediakan pendidikan dan pelatihan intensif mengenai teknologi pertanian terbaru kepada petani dan peternak untuk mendorong adopsi inovasi.</p> <p>6. Fasilitasi Akses Teknologi: Membuat teknologi pertanian lebih mudah diakses, misalnya dengan penyediaan peralatan pertanian modern secara terjangkau atau skema pinjaman.</p> <p>7. Pusat Inovasi Pertanian: Mendirikan pusat inovasi pertanian di komunitas-komunitas pertanian untuk memfasilitasi kolaborasi, pengujian teknologi baru, dan berbagi pengetahuan.</p> <p>8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan: Mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk petani dalam mengelola kelembagaan mereka dengan pendekatan bisnis yang lebih baik.</p> <p>9. Pengenalan Konsep Agribisnis: Mendukung petani untuk memahami konsep agribisnis, termasuk perencanaan produksi, pemasaran, dan manajemen keuangan.</p>

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>10. Pengenalan Teknologi Digital: Memberikan pelatihan kepada petani dalam penggunaan teknologi digital, termasuk pemasaran online, aplikasi pertanian, dan platform perdagangan digital.</p> <p>11. Pengembangan Marketplace Digital: Mendorong pembentukan marketplace digital khusus untuk produk pertanian, memungkinkan petani untuk berinteraksi langsung dengan konsumen dan mendapatkan harga yang lebih baik.</p> <p>12. Kerjasama dengan Startup Teknologi: Menggandeng startup teknologi yang fokus pada pertanian untuk mengembangkan solusi digital yang dapat membantu petani dalam pemasaran dan distribusi produk.</p>

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Point	2,4	2,6	2,6	100,00	<p>1. Masih rendahnya kapasitas SDM penyuluh terkait Kelembagaan Ekonomi Petani dan konsolidasi petani untuk berkorporasi;</p> <p>2. Minat Generasi Muda Pada Sektor Pertanian rendah</p> <p>3. Masih Rendahnya Kompetensi SDM Petani/Peternak termasuk dalam Peningkatan Nilai Tambah;</p> <p>4. Tingkat Adopsi dan Inovasi Teknologi belum optimal</p> <p>5. Kelembagaan Belum Berorientasi Bisnis;</p> <p>6. Berkembangnya Digitalisasi Pasar.</p> <p>7. Belum optimalnya peningkatan kelas kelompok tani mengenai manajemen kelembagaan kelompok tani.</p> <p>8. Faktor usia SDM petani dan kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian."</p>		<p>1. Kreativitas SDM penyuluh pertanian dalam pengembangan ilmu dan teknologi pertanian.</p> <p>2. Mengerakan petani milenial dalam bisnis pertanian.</p>	<p>1. Program Magang dan Pelatihan: Mengembangkan program magang dan pelatihan yang menarik dan praktis, dengan mengajak generasi muda untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pertanian modern dan berkelanjutan.</p> <p>2. Pendidikan Berbasis Pertanian: Mendorong inklusi pendidikan pertanian di tingkat sekolah, serta menjadikan materi pertanian menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda.</p> <p>3. Pelatihan Keterampilan: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis, seperti pengelolaan usaha pertanian, pemasaran, dan manajemen, untuk meningkatkan daya saing petani dan peternak.</p> <p>4. Pendampingan Teknis: Memberikan dukungan pendampingan teknis kepada petani dan peternak dalam menerapkan praktik-praktik modern yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah.</p> <p>5. Pendidikan Teknologi: Menyediakan pendidikan dan pelatihan intensif mengenai teknologi pertanian terbaru kepada petani dan peternak untuk mendorong adopsi inovasi.</p> <p>6. Fasilitasi Akses Teknologi: Membuat teknologi pertanian lebih mudah diakses, misalnya dengan penyediaan peralatan pertanian modern secara terjangkau atau skema pinjaman.</p> <p>7. Pusat Inovasi Pertanian: Mendirikan pusat inovasi pertanian di komunitas-komunitas pertanian untuk memfasilitasi kolaborasi, pengujian teknologi baru, dan berbagi pengetahuan.</p> <p>8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan: Mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk petani dalam mengelola kelembagaan mereka dengan pendekatan bisnis yang lebih baik.</p> <p>9. Pengenalan Konsep Agribisnis: Mendukung petani untuk memahami konsep agribisnis, termasuk perencanaan produksi, pemasaran, dan manajemen keuangan.</p> <p>10. Pengenalan Teknologi Digital: Memberikan pelatihan kepada petani dalam penggunaan teknologi digital, termasuk pemasaran online, aplikasi pertanian, dan platform perdagangan digital.</p> <p>11. Pengembangan Marketplace Digital: Mendorong pembentukan marketplace digital khusus untuk produk pertanian, memungkinkan petani untuk berinteraksi langsung dengan konsumen dan mendapatkan harga yang lebih baik.</p> <p>12. Kerjasama dengan Startup</p>
							2023			

1	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh	Kegiatan	69	44	44	100,00	Masih rendahnya kapasitas SDM penyuluh terkait Kelembagaan Ekonomi Petani dan konsolidasi petani untuk berkorporasi;	Kapasitas SDM penyuluh baik pengetahuan, sikap dan ketrampilan penyuluh pertanian perlu ditingkatkan	Kreativitas SDM penyuluh pertanian dalam pengembangan ilmu dan teknologi pertanian.	Perlunya kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi penyuluh pertanian
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		5	5	100,00				
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitas dan kualitas kelembagaan taninya	Kelompok	233	150	150	100,00				
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	233	150	150	100,00	masih rendahnya SDM pada kelembagaan kelompok tani	perlu ada sosialisasi dan bimbingan teknis dan pendampingan dari ti teknis	perlu adanya motivasi dan pendampingan dari penyuluh pertanian	Bimbingan teknis
c	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah kelompok tani/gabpoktan yang sudah membentuk Badan usaha milik petani yang berbadan hukum	Kelompok/ Gapoktan	0	2	2	100,00	masih sedikit BUMD yg berbadan hukum	perlu adanya sosialisasi	perlu pendampingan dari tim teknis dan penyuluh pertanian lapangan	sosialisasi, bimbtekn dan pendampingan
		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	0	2	2	100,00				
d	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelaksanaan Sekolah Lapang	Unit	42	5	5	100,00	1. Masih rendahnya kapasitas SDM Petani terkait Kelembagaan Ekonomi Petani dan konsolidasi petani untuk berkorporasi; 2. Masih rendahnya Minat Generasi Muda Pada Sektor Pertanian rendah 3. Tingkat Adopsi dan Inovasi Teknologi belum optimal 4. Kelembagaan Belum Berorientasi Bisnis; 5. Faktor usia SDM petani dan kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian."	Sosialisasi Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Konsolidasi dalam Korporasi Petani serta Peningkatan Kapasitas SDM Petani	1. Kreativitas SDM petani dalam pengembangan ilmu dan teknologi pertanian. 2. Mengerakan petani milenial dalam manajemen usahatani kelompok tani	1. Replikasi Kegiatan konsolidasi Petani dalam Penumbuhan Korporasi Petani serta pendampingan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani

URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	USULAN/ REKOMENDASI
				TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	42	5	5	100,00	<p>1. Masih rendahnya kapasitas SDM Petani terkait Kelembagaan Ekonomi Petani dan konsolidasi petani untuk berkorporasi;</p> <p>2. Masih rendahnya Minat Generasi Muda Pada Sektor Pertanian rendah</p> <p>3. Tingkat Adopsi dan Inovasi Teknologi belum optimal</p> <p>4. Kelembagaan Belum Berorientasi Bisnis;</p> <p>5. Faktor usia SDM petani dan kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian."</p>	Sosialisasi Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Konsolidasi dalam Korporasi Petani serta Peningkatan Kapasitas SDM Petani	<p>1. Kreativitas SDM petani dalam pengembangan ilmu dan teknologi pertanian.</p> <p>2. Mengerakan petani milenial dalam manajemen usahatani kelompok tani</p>	1. Replikasi Kegiatan konsolidasi Petani dalam Penumbuhan Korporasi Petani serta pendampingan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani
Rata-rata capaian										

Lampiran 3. Target, Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun Anggaran 2023

Bulan Desember

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/ SOLUSI
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16
02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.777.974.000		18.777.974.000	100	100	17.097.383.414	1.323.436.608	18.420.820.022	98,1	100	1,9	0		
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.695.000		172.695.000	100	100	141.975.015	20.094.000	162.069.015	93,85	100	6,15	0		
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.602.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	50.602.000	100	100	48.847.700		48.847.700	96,53	100	3,47	0		
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.093.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	122.093.000	100	100	93.127.315	20.094.000	113.221.315	92,73	100	7,27	0		
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.459.705.000		17.459.705.000	100	100	15.862.172.960	1.266.544.885	17.128.717.845	98,1	100	1,9	0		
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.339.376.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	17.339.376.000	100	100	15.757.196.414	1.252.831.031	17.010.027.445	98,1	100	1,9	0		
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	120.329.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A	120.329.000	100	100	104.976.546	13.713.854	118.690.400	98,64	100	1,36	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		PBD Perubahan												
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000		7.200.000	100	100	6.997.100		6.997.100	97,18	100	2,82	0		
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	7.200.000	100	100	6.997.100		6.997.100	97,18	100	2,82	0		
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.230.000		82.230.000	100	100	82.041.600		82.041.600	99,77	100	0,23	0		
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.230.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	82.230.000	100	100	82.041.600		82.041.600	99,77	100	0,23	0		
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.356.000		188.356.000	100	100	175.270.021	9.960.000	185.230.021	98,34	100	1,66	0		
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.928.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	4.928.000	100	100	4.925.100		4.925.100	99,94	100	0,06	0		
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.608.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	44.608.000	100	100	42.874.000	1.570.000	44.444.000	99,63	100	0,37	0		
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	9.900.000	100	100	9.899.900		9.899.900	100	100	0	0		
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.720.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	5.720.000	100	100	5.170.000	470.000	5.640.000	98,6	100	1,4	0		
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.200.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	35.200.000	100	100	33.412.600		33.412.600	94,92	100	5,08	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH				
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI		KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				(%)	(%)				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16			
			Lainnya)															
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	80.000.000	100	100	71.106.021	7.920.000	79.026.021	98,78	100	1,22	0					
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	8.000.000	100	100	7.882.400		7.882.400	98,53	100	1,47	0					
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.202.000		211.202.000	100	100	208.825.000		208.825.000	98,87	100	1,13	0					
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.688.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	152.688.000	100	100	150.825.000		150.825.000	98,78	100	1,22	0					
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.514.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	58.514.000	100	100	58.000.000		58.000.000	99,12	100	0,88	0					
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.246.000		267.246.000	100	100	233.186.294	26.230.723	259.417.017	97,07	100	2,93	0					
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.496.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	1.496.000	100	100	1.494.500		1.494.500	99,9	100	0,1	0					
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.400.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	183.400.000	100	100	158.423.794	17.716.723	176.140.517	96,04	100	3,96	0					
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.350.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A	82.350.000	100	100	73.268.000	8.514.000	81.782.000	99,31	100	0,69	0					

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
			PBD Perubahan												
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.340.000		389.340.000	100	100	386.915.424	607.000	387.522.424	99,53	100	0,47	0		
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.340.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	115.340.000	100	100	114.682.424	607.000	115.289.424	99,96	100	0,04	0		
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.600.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	27.600.000	100	100	27.600.000		27.600.000	100	100	0	0		
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.400.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	246.400.000	100	100	244.633.000		244.633.000	99,28	100	0,72	0		
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	40.000.000		40.000.000	100	100	39.531.300	130.000	39.661.300	99,15	100	0,85	0		
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	40.000.000		40.000.000	100	100	39.531.300	130.000	39.661.300	99,15	100	0,85	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16
	Kabupaten/Kota														
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	40.000.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	40.000.000	100	100	39.531.300	130.000	39.661.300	99,15	100	0,85	0		
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	0	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	662.381.000		662.381.000	100	100	589.151.975	67.237.812	656.389.787	99,1	100	0,9	0		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	171.932.000		171.932.000	100	100	149.778.000	20.665.212	170.443.212	99,13	100	0,87	0		
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	72.000.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	72.000.000	100	100	64.823.100	6.282.200	71.105.300	98,76	100	1,24	0		
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	99.932.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya), APBD Perubahan	99.932.000	100	100	84.954.900	14.383.012	99.337.912	99,41	100	0,59	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN					DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			REALISASI FISIK S/D BULAN INI	KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	244.883.000		244.883.000	100	100	207.341.375	35.270.600	242.611.975	99,07	100	0,93	0		
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	244.883.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	244.883.000	100	100	207.341.375	35.270.600	242.611.975	99,07	100	0,93	0		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	245.566.000		245.566.000	100	100	232.032.600	11.302.000	243.334.600	99,09	100	0,91	0		
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	245.566.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan, DAK	245.566.000	100	100	232.032.600	11.302.000	243.334.600	99,09	100	0,91	0		
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.094.537.000		1.094.537.000	100	100	1.074.062.700	13.036.970	1.087.099.670	99,32	100	0,68	0		
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	14.400.000		14.400.000	100	100	11.131.600	2.865.000	13.996.600	97,2	100	2,8	0		
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	14.400.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	14.400.000	100	100	11.131.600	2.865.000	13.996.600	97,2	100	2,8	0		
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	1.080.137.000		1.080.137.000	100	100	1.062.931.100	10.171.970	1.073.103.070	99,35	100	0,65	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16
	Kabupaten/Kota														
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.080.137.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	1.080.137.000	100	100	1.062.931.100	10.171.970	1.073.103.070	99,35	100	0,65	0		
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	95.166.000		95.166.000	100	100	82.326.400	11.691.100	94.017.500	98,79	100	1,21	0		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	95.166.000		95.166.000	100	100	82.326.400	11.691.100	94.017.500	98,79	100	1,21	0		
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	66.366.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	66.366.000	100	100	55.423.000	10.248.700	65.671.700	98,95	100	1,05	0		
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	28.800.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	28.800.000	100	100	26.903.400	1.442.400	28.345.800	98,42	100	1,58	0		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.149.436.000		15.149.436.000	100	100	8.763.798.766	4.479.260.195	13.243.058.961	87,42	100	12,58	0		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.727.375.000		5.727.375.000	100	100	5.078.254.692	363.177.200	5.441.431.892	95,01	100	4,99	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.664.175.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan, DAK	5.664.175.000	100	100	5.051.448.340	330.206.200	5.381.654.540	95,01	100	4,99	0		
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	63.200.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	63.200.000	100	100	26.806.352	32.971.000	59.777.352	94,58	100	5,42	0		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	9.072.212.000		9.072.212.000	100	100	3.367.160.999	4.089.342.520	7.456.503.519	82,19	100	17,81	0		
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	147.166.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	147.166.000	100	100	128.879.900	8.542.000	137.421.900	93,38	100	6,62	0		
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	8.442.397.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	8.442.397.000	100	100	2.792.331.350	4.061.062.600	6.853.393.950	81,18	100	18,82	0	nsi	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	482.649.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	482.649.000	100	100	445.949.749	19.737.920	465.687.669	96,49	100	3,51	0		
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	178.813.000		178.813.000	100	100	164.816.075	10.245.475	175.061.550	97,9	100	2,1	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16
	Kabupaten/Kota														
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	178.813.000		178.813.000	100	100	164.816.075	10.245.475	175.061.550	97,9	100	2,1	0		
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	20.380.000		20.380.000	100	100	20.359.800		20.359.800	99,9	100	0,1	0		
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	20.380.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	20.380.000	100	100	20.359.800		20.359.800	99,9	100	0,1	0		
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.656.000		150.656.000	100	100	133.207.200	16.495.000	149.702.200	99,37	100	0,63	0		
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	111.716.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya), APBD Perubahan	111.716.000	100	100	97.980.900	12.866.000	110.846.900	99,22	100	0,78	0		
3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	38.940.000		38.940.000	100	100	35.226.300	3.629.000	38.855.300	99,78	100	0,22	0		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.264.532.053		12.264.532.053	100	100	10.971.419.574	983.350.155	11.954.769.729	97,47	100	2,53	0		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana	1.586.993.053		1.586.993.053	100	100	872.927.930	577.552.955	1.450.480.885	91,4	100	8,6	0		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16
	Pertanian														
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.586.993.053	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan, DBHCHT	1.586.993.053	100	100	872.927.930	577.552.955	1.450.480.885	91,4	100	8,6	0		
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.173.769.000		5.173.769.000	100	100	4.827.114.200	302.889.300	5.130.003.500	99,15	100	0,85	0		
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	763.535.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	763.535.000	100	100	755.462.100	4.593.000	760.055.100	99,54	100	0,46	0		
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.563.000.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	2.563.000.000	100	100	2.552.704.700		2.552.704.700	99,6	100	0,4	0		
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	652.889.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	652.889.000	100	100	345.004.300	286.268.300	631.272.600	96,69	100	3,31	0		
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana	428.345.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	428.345.000	100	100	412.059.600	12.028.000	424.087.600	99,01	100	0,99	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI									
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Pendukungnya														
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	766.000.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	766.000.000	100	100	761.883.500		761.883.500	99,46	100	0,54	0		
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5.503.770.000		5.503.770.000	100	100	5.271.377.444	102.907.900	5.374.285.344	97,65	100	2,35	0		
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	5.503.770.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	5.503.770.000	100	100	5.271.377.444	102.907.900	5.374.285.344	97,65	100	2,35	0		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.019.714.000		2.019.714.000	100	100	1.847.904.086	121.260.000	1.969.164.086	97,5	100	2,5	0		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	457.032.000		457.032.000	100	100	390.230.686	55.790.000	446.020.686	97,59	100	2,41	0		
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	457.032.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	457.032.000	100	100	390.230.686	55.790.000	446.020.686	97,59	100	2,41	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	163.648.000		163.648.000	100	100	125.782.900	21.268.000	147.050.900	89,86	100	10,14	0		
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	135.408.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	135.408.000	100	100	102.268.100	16.585.000	118.853.100	87,77	100	12,23	0	nsi	
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	28.240.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	28.240.000	100	100	23.514.800	4.683.000	28.197.800	99,85	100	0,15	0		
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.267.660.000		1.267.660.000	100	100	1.212.491.500	34.834.000	1.247.325.500	98,4	100	1,6	0		
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.267.660.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),D AK	1.267.660.000	100	100	1.212.491.500	34.834.000	1.247.325.500	98,4	100	1,6	0		
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	106.014.000		106.014.000	100	100	95.193.300	8.293.000	103.486.300	97,62	100	2,38	0		
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	88.016.000		88.016.000	100	100	78.803.000	7.693.000	86.496.000	98,27	100	1,73	0		
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan	17.998.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A	17.998.000	100	100	16.390.300	600.000	16.990.300	94,4	100	5,6	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
3.27.04.2.05	Masyarakat Veteriner Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	25.360.000	PBD Perubahan	25.360.000	100	100	24.205.700	1.075.000	25.280.700	99,69	100	0,31	0		
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	25.360.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	25.360.000	100	100	24.205.700	1.075.000	25.280.700	99,69	100	0,31	0		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	591.132.000		591.132.000	100	100	454.059.120	107.123.500	561.182.620	94,93	100	5,07	0		
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	591.132.000		591.132.000	100	100	454.059.120	107.123.500	561.182.620	94,93	100	5,07	0		
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	527.932.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya),A PBD Perubahan	527.932.000	100	100	392.640.060	106.911.500	499.551.560	94,62	100	5,38	0		
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	63.200.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	63.200.000	100	100	61.419.060	212.000	61.631.060	97,52	100	2,48	0		
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	50.068.000		50.068.000	100	100	46.038.250	3.329.000	49.367.250	98,6	100	1,4	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.716.000		24.716.000	100	100	22.563.750	1.829.000	24.392.750	98,69	100	1,31	0		
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	24.716.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	24.716.000	100	100	22.563.750	1.829.000	24.392.750	98,69	100	1,31	0		
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	25.352.000		25.352.000	100	100	23.474.500	1.500.000	24.974.500	98,51	100	1,49	0		
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	25.352.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	25.352.000	100	100	23.474.500	1.500.000	24.974.500	98,51	100	1,49	0		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.436.022.000		2.436.022.000	100	100	1.966.603.598	367.155.943	2.333.759.541	95,8	100	4,2	0		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.436.022.000		2.436.022.000	100	100	1.966.603.598	367.155.943	2.333.759.541	95,8	100	4,2	0		
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas	1.962.800.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	1.962.800.000	100	100	1.572.569.262	298.687.003	1.871.256.265	95,34	100	4,66	0		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI									
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Lainnya),A PBD Perubahan, DAK												
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	141.796.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	141.796.000	100	100	107.659.361	31.520.900	139.180.261	98,16	100	1,84	0		
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	95.910.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	95.910.000	100	100	58.407.300	35.797.840	94.205.140	98,22	100	1,78	0		
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	235.516.000	APBD (DAU Earmarked), APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	235.516.000	100	100	227.967.675	1.150.200	229.117.875	97,28	100	2,72	0		
JUMLAH		53.180.962.053		53.180.962.053	100	100	42.932.279.183	7.477.011.283	50.409.290.466	94,79	100	5,21	0		

Lampiran 4. Daftar Prestasi/penghargaan yang diperoleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln. Gatot Subroto Kompleks Tarubudaya Ungaran Telepon : (024) 6921010, 6921348
Fax. : (024) 6921060 laman <http://www.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : distanbun@jatengprov.go.id



SERTIFIKAT

Nomor : 527.33/37904/2023

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
dengan ini menyatakan bahwa :

IRAWATI, S.P

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

sebagai

**JUARA III LOMBA TESTIMONI PROGRAM KARTU TANI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH**

Ungaran, Juli 2023

**KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



SUPRIYANTO, SP., MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19671023 199703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor : 503.25 / 59 / VII / 2023

Diberikan kepada

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

**SEBAGAI JUARA III
STAND TERBAIK KATEGORI KABUPATEN/KOTA**

Temu Inovasi Wirausaha Pertanian - Soropadan Agro Festival II, yang diselenggarakan di Agro Center Soropadan Pada Tanggal 20 s/d 24 Juli 2023

Temanggung, 24 Juli 2023

KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN







**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN**

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor : 503.25 / 60 / VII / 2023

Diberikan kepada

VERA HARIYATI

Atas partisipasinya dalam kegiatan Soropadan Agro Festival II tanggal 20 s/d 24 Juli 2023

**PESERTA
LOMBA PENYAJIAN OLAHAN DARI UMBI - UMBIAN**

Semarang, 22 Juli 2023

**KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN
JAWA TENGAH**



**HERU CAHYA NUGRAHA, S.Hut M.MA
NIP. 19760419 200003 1 002**


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor : 503.25 / 60 / VII / 2023

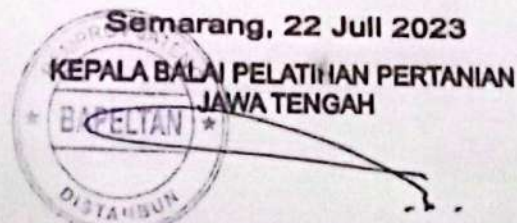
Diberikan kepada

SUMARNI

Atas partisipasinya dalam kegiatan Soropadan Agro Festival II tanggal 20 s/d 24 Juli 2023

PESERTA
LOMBA PENYAJIAN OLAHAN DARI UMBI - UMBIAN

Semarang, 22 Juli 2023



HERU CAHYA NUGRAHA, S.Hut M.MA
NIP. 19760419 200003 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN**

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor : 503.25 / 60 / VII / 2023

Diberikan kepada

SUMARNI

Atas partisipasinya dalam kegiatan Soropadan Agro Festival II tanggal 20 s/d 24 Juli 2023

**PESERTA
LOMBA PENYAJIAN OLAHAN DARI UMBI - UMBIAN**

Samarang, 22 Juli 2023



**KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN
JAWA TENGAH**

**HERU CAHYA NUGRAHA, S.Hut M.MA
NIP. 19760419 200003 1 002**



GUBERNUR JAWA TENGAH
PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor: 002.5/0014576

Dasar : Keputusan Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/171 Tahun 2023
Tentang Pemenang Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Diberikan kepada:

KTT. MAJU BERSAMA

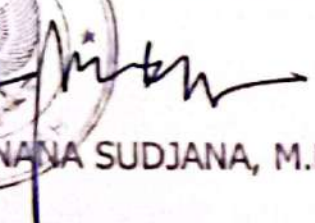
Desa Klegenrejo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen

Sebagai:

JUARA II

Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Komoditas Sapi Potong



Semarang, September 2023
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

Drs: NANA SUDJANA, M.M.

Piagam Penghargaan

Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi Kepada :

HIKMAH AGUSTIN, SP., MM

Atas prestasi kerja yang baik dalam meningkatkan produksi dan produktivitas melalui kegiatan CSA SIMURP, sebagai :

PENYULUH TERBAIK SIMURP

Jakarta, 22 Desember 2023

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian



Dr. Ir. Bustanul Arifin Caya, M.D.M.

NIP : 19650110 199003 1 004



Profesional
Daya Saing
Inklusif



Piagam Penghargaan

Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi Kepada:

POKTAN MULYO TANI, KAB. KEBUMEN

Atas prestasi kerja yang mampu meningkatkan produksi dan produktivitas melalui teknologi CSA SIMURP, sebagai:

KELOMPOK TANI TERBAIK SIMURP

Jakarta, 22 Desember 2023

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian



Dr. Ir. Bustanu Arifin Caya, M.D.M.
NIP : 19650110 199003 1 004



Profesional
Gaya Hidup
Kebumahaan



SIMURP
Sustainable Intensification Model for Rice Production



PIAGAM PENGHARGAAN

Memberikan Penghargaan Kepada:

Mulya Tari

KELOMPOK TANI BERPRESTASI

Makassar, 23 Desember 2023

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, M. P